PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2021

PUSDIKLAT BPS

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Pusdiklat BPS sebagai penyelenggara negara atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu (1) Meningkatkan Layanan Pendidikan dan Pelatihan yang Adaptif dan (2) Meningkatkan Kompetensi SDM.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2021 bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja sasaran Pusdiklat BPS selama tahun 2021. Selain itu pula untuk memberikan gambaran sekaligus sebagai penyampaian informasi kinerja yang terukur mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang telah dicapai.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, perkembangan rata-rata capaian kinerja indikator sasaran terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS tahun 2020-2024, dan Reviu Renstra Tahun 2021. Hasil laporan diharapkan menjadi masukan sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal pada tahun mendatang.

Pimpinan Pusdiklat BPS mengapresiasi atas peran serta dan kolaborasi tim kerja penyusun Lakip Pusdiklat BPS 2021. Perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas penyusunan Lakip ini sangat terbuka dari semua pihak untuk penyempurnaan pada masa mendatang.

Jakarta, 27 Januari 2022

Kepala Pusdiklat BPS

Eni Lestariningsih, S.Si, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR LAMPIRAN x
RINGKASAN EKSEKUTIF xi
PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Maksud dan Tujuan 5
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 5
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) 7
1.5. Potensi dan Permasalahan 10
1.5.1. Potensi yang Dimiliki 11
1.5.2. Permasalahan yang Dihadapi 13
1.6. Sistematika Penyajian Laporan 14
PERENCANAAN KINERJA 17
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2020-2024 17
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS Tahun 2021 20
AKUNTABILITAS KINERJA 27
3.1. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2021 27
3.2. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis 27
3.3. Perkembangan Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2021 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 31
3.4. Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS Tahun 2021 108
3.5. Upaya Efisiensi di Pusdiklat BPS 108
3.6. Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Tahun 2021 111
PENUTUP 119

4.1. Tinjauan Umum 119
4.2. Tindak Lanjut 120
LAMPIRAN 125

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS 2020-2024 19
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2021 21
Tabel 3. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator 22
Tabel 4. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021 28
Tabel 5. Perbandingan rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis 32
Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2021 33
Tabel 7. Capaian Nilai Persentase Kepuasan Penyelenggaraan Diklat Tahun 2021 34
Tabel 8. Jenis dan Jumlah Pelatihan Tahun 2021 37
Tabel 9. Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS yang Dilaksanakan Tahun 2021 39
Tabel 10. Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Dasar CPNS yang Lulus Memuaskan Tahun 2021 40
Tabel 11. Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan yang Dilaksanakan Tahun 2021 48
Tabel 12. Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Kepemimpinan yang Lulus Memuaskan Tahun 2021 48
Tabel 13. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ke 2 Tahun 2021 81
Tabel 14. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ke 3 Tahun 2021 84
Tabel 15. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2021 85
Tabel 16. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ke 4 Tahun 2021 95

Tabel 17. Jumlah Pegawai BPS yang memperoleh Beasiswa S2 dan S3 Tahun 2021 98
Tabel 18. Jumlah Pegawai BPS yang Menempuh Pendidikan Melalui Izin Belajar Tahun 2021 101
Tabel 19. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ke 5 Tahun 2021 102
Tabel 20. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ke 5 Tahun 2021 105
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2021 107
Tabel 22. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Dalam Program Dukman Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2021 112
Tabel 23. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Dalam Program Dukman Menurut Rincian Belanja Tahun Anggaran 2021 112
Tabel 24. Anggaran Pusdiklat BPS Tahun 2021 Menurut Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja 114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdiklat BPS 7
Gambar 2. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Jenis Kelamin dan Kepangkatan 7
Gambar 3. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Jabatan 8
Gambar 4. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan 9
Gambar 5. Distribusi SDM Pusdiklat BPS berdasarkan Kelompok Umur 10
Gambar 6. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS 20
Gambar 7. Kegiatan Pembekalan terhadap Peserta Latsar CPNS Tahun 2021 41
Gambar 8. Kegiatan Pembinaan Sikap Perilaku Latsar CPNS Golongan II 43
Gambar 9. Kegiatan Pembelajaran Distance Learning dan Klasikal 43
Gambar 10. Kegiatan Seminar Rancangan dan Evaluasi Aktualisasi 44
Gambar 11. Kegiatan Pembelajaran Agenda Sikap Perilaku Bela Negara 45
Gambar 12. Kegiatan Pembelajaran Distance Learning dan Klasikal 45
Gambar 13. Kegiatan Seminar Rancangan dan Evaluasi Aktualisasi 46
Gambar 14. Kegiatan Pembelajaran Distance Learning PKP 50
Gambar 15. Kegiatan Studi Lapangan PKP 51
Gambar 16. Kegiatan Seminar Rancangan dan Evaluasi Aksi Perubahan PKP 51
Gambar 17. Kegiatan Berbagi Pengalaman Memimpin Aksi Perubahan PKP 52
Gambar 18. Kegiatan Pembelajaran Distance Learning PKA 54
Gambar 19. Kegiatan Studi Lapangan PKA 55
Gambar 20. Kegiatan Seminar Rancangan dan Evaluasi Aksi Perubahan PKA 56
Gambar 21. Rangkaian Kegiatan Penutupan PKA 56
Gambar 22. Kegiatan Indepth Interview terhadap Responden EPD 59
Gambar 23. Kegiatan belajar dengan Fasilitator Ibu Sri Rum Giyarsih dari Universitas Gajah Mada 62

Gambar 24. Kegiatan Seminar Pelatihan Teknis KTI Prakom 62
Gambar 25. Kegiatan Seminar Pelatihan Penulisan KTI STatistisi 64
Gambar 26. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Statistik Sektoral 65
Gambar 27. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Statistik Sektoral melalui Zoom Meeting 66
Gambar 28. Pembelajaran melalui Zoom Meeting AHA Training 67
Gambar 29. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Pembina 100 68
Gambar 30. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis 69
Gambar 31. Kegiatan Pelatihan Pembina Desa Cantik Tambahan 70
Gambar 32. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Pembina 100 Desa Cantik Tahap II 71
Gambar 33. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Pembina 100 Desa Cantik Tahap II 71
Gambar 34. Kegiatan Pembukaan Short Course Pranata Komputer 73
Gambar 35. Kegiatan Pembelajaran melalui Zoom Meeting Short Course Prakom 73
Gambar 36. Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh Pelatihan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli 75
Gambar 37. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Fungsional Auditor Tingkat Ahli 77
Gambar 38. Kegiatan Pembelajaran Refreshing PBJ Pemerintah 79
Gambar 39. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan PBJ Pemerintah 79
Gambar 44. Kegiatan Ujian Sertifikasi PBJ Pemerintah 79
Gambar 45. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Statistik Sektoral 82
Gambar 46. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Statistik Sektoral 82
Gambar 47. Kegiatan Evaluasi & Strategi Pengembangan Kompetensi SDM Pusdiklat BPS di Yogyakarta 89
Gambar 48. Workshop Pengembangan Kompetensi dan Pelayanan Diklat 91
Gambar 49. Kegiatan Publik Speaking dan Table Manner 92
Gambar 50. Kegiatan Pengembangan Diri 'Beauty Class Wardah' 93
Gambar 51. Seminar dan Pameran Inovasi Alumni Diklat 94
Gambar 52. Inisiasi Kerjasama Rintisan Gelar dengan Universitas Brawijaya 99

Gambar 53. Inisiasi Kerjasama Tugas Belajar Program Splitsite Double Degree sponsor APBN BPS-Australia Awards antara Universitas Airlangga dan University of Western, Australia. 99
Gambar 54. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Rintisan Gelar sponsor APBN BPS dan Rencana Kegiatan Shortcourse dengan Universitas Diponegoro 100
Gambar 55. Monitoring dan Evaluasi Rintisan Gelar Sponsor APBN BPS di Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Renstra Pusdiklat BPS 2020-2024 125
Lampiran 2. Reviu I Renstra Pusdiklat BPS 2020-2024 126
Lampiran 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS 2021 127
Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 130

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusdiklat BPS disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat BPS atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sebelumnya Pusdiklat BPS mempunyai dua tujuan dan empat sasaran strategis, kemudian dilakukan reviu sehingga menjadi dua tujuan dan lima sasaran strategis yang masing-masing memiliki indikator yang terukur sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerjanya. Dua tujuan capaian kinerja yaitu (1) **Meningkatkan Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Yang Adaptif** dan (2) **Meningkatkan Kompetensi SDM**. Tujuan pertama dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku, dan (2) Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam Kerangka Satu Data Indonesia. Sementara itu, untuk tujuan kedua dicapai dengan tiga sasaran strategis, yaitu: (1) Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi, (2) Terjalinnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan, (3) Penguatan manajemen internal dan sumberdaya.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pada periode Renstra 2020-2024. Berdasarkan Tabel 14, jika dibandingkan target Renstra tahun 2021, maka sebagian besar capaian indikator dari tujuan dan sasaran menunjukkan hasil yang maksimal, yaitu diperoleh nilai realisasi lebih dari target yang diharapkan sehingga capaian kinerjanya melebihi dari 100 persen.

Capaian realisasi pada indikator pertama yaitu persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat sebesar 90 persen. Angka tersebut sama dengan target Renstra tahun 2021, sehingga capaian terhadap Renstra adalah 100 persen. Keberhasilan ini berkat upaya dan kerja keras dari seluruh pihak terkait dan

diharapkan agar di masa mendatang diperoleh capaian kinerja yang lebih tinggi mengingat indikator kepuasan peserta diklat dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan Pusdiklat BPS dalam menyelenggarakan kegiatan diklat.

Pada indikator kedua yaitu persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral berhasil melebihi target Renstra 2021 yaitu dengan target sebesar 85 persen diperoleh realisasi sebesar 100 persen sehingga capaiannya adalah sebesar 117,65 persen.

Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi merupakan indikator ketiga juga telah berhasil melebihi target yaitu dengan target Renstra 2021 sebesar 90 persen diperoleh realisasi sebesar 100 persen sehingga capaiannya adalah sebesar 111,11 persen.

Capaian indikator keempat yaitu persentase kelulusan peserta tugas belajar juga telah melebihi dari target Renstra 2020 yaitu dengan target Renstra 2021 sebesar 90 persen diperoleh realisasi sebesar 100 persen sehingga capaiannya adalah sebesar 111,11 persen.

Pada indikator kelima yaitu hasil penilaian SAKIP, belum dapat diperoleh capaian yang diperoleh nilai sebenarnya karena penilaian masih mengacu pada nilai tahun 2020 yaitu sebesar 64,72 poin sehingga dari target Renstra 2021 sebesar 70 poin diperoleh capaian dibawah 100 yaitu 92,46 persen.

Indikator terakhir yaitu persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur diperoleh nilai capaian 108,29 persen. Angka tersebut telah melebihi target yaitu realisasi 97,46 persen dari target Renstra 90 persen. Dengan capaian kinerja diatas 100 persen diperlukan penajaman target pada Renstra 2020-2024 agar pengukuran keberhasilan Pusdiklat BPS terhadap indicator-indikator tersebut lebih tergambarkan.

Kegiatan yang menjadi prioritas Pusdiklat BPS pada tahun 2021 ini masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu pelaksanaan pelatihan dasar atau Latsar CPNS formasi penerimaan tahun 2020. Namun, karena belum terbitnya SK penugasan atau penempatan mereka di satuan kerja BPS di daerah, maka di awal

tahun yaitu bulan Januari 2021 BPS mendahulukan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas bagi para pejabat pengawas baik yang ada di pusat maupun daerah.

Setelah para CPNS bertugas dan ditempatkan di masing-masing satuan kerja baik di pusat maupun daerah, Pusdiklat BPS mengatur jadwal pelaksanaan Latsar CPNS BPS sejak bulan Juni sampai dengan November 2020. Penyelenggaraan Latsar bagi para CPNS baik golongan II maupun golongan III berasal dari lulusan Politeknik Statistika STIS dan beberapa lulusan Program Diploma PKN STAN.

Untuk kegiatan pelatihan teknis yang menjadi prioritas adalah Pelatihan Statistik Sektoral Kabupaten/Kota, pesertanya berasal dari BPS Kabupaten/Kota, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik), serta Organisasi Perangkat Desa/Produsen Data. Selain itu Pelatihan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga yang pesertanya berasal dari beberapa Pusdatin, Pusdiklat, dan Organisasi Perangkat Desa/Produsen Data Kementerian/Lembaga.

Tujuan diklat ini untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan agar mampu menjalankan tugas walidata statistik sektoral di daerah dan membantu walidata dalam membina produsen data di daerahnya.

Pada tahun 2021 Pusdiklat BPS menerima pagu sebesar Rp. 71,81 miliar yang seluruhnya terdiri dari Program Dukungan Manajemen. Karena pada tahun 2021 masih terjadi pandemic COVID-19, seluruh anggaran Kementerian/Lembaga termasuk juga BPS direfocusing untuk penanganan covid di Indonesia sehingga pagu anggaran Pusdiklat BPS direvisi menjadi Rp 69,54 miliar atau berkurang sebesar 2,27 miliar. Total penggunaan anggaran Pusdiklat BPS pada tahun 2021 sebesar Rp 65,01 miliar dengan kata lain realisasi anggaran Pusdiklat BPS pada tahun 2021 mencapai **93,49** persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang penyerapannya sebesar 91,51 persen, penyerapan tahun 2021 merupakan prestasi yang membanggakan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19.

Bila dilihat menurut sumber dana, pagu anggaran yang tersedia terdiri dari Rp. 50.028.894.000,- atau 97,64 persen berasal dari rupiah murni dan sisanya Rp 1.210.680.000,- atau 2,36 persen berasal dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Penggunaan anggaran pada Pusdiklat BPS telah Optimal dan Efisien. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 106,76 persen dengan realisasi anggaran 93,49 persen. Bila dilihat realisasi anggaran terbesar diserap oleh Sasaran Strategis keempat yakni terjalinnya kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan mencapai 97,71 persen. Penggunaan anggaran tersebut untuk membayar biaya pendidikan seluruh peserta tugas belajar, bantuan biaya hidup per bulan, bantuan uang buku dan referensi per tahun, bantuan riset/penelitian/seminar per tahun, biaya perjalanan pemanggilan dan pemulangan peserta tugas belajar, dan biaya perjalanan dalam rangka kerjasama perguruan tinggi. Sejalan dengan pencapaian targetnya yang melebihi nilai target yang ditentukan, dapat disimpulkan bahwa program kerjasama dengan Perguruan Tinggi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pegawai BPS. Pencapaian ini setara dengan penyerapan anggaran yang terealisasi.

Sebaliknya, realisasi terendah berada di Sasaran Strategis pertama Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku dengan penyerapan anggaran sebesar 81,58 persen. Bila dilihat dari pencapaian target untuk sasaran strategis pertama ini telah mencapai target yaitu 100,00 persen. Hal ini menggambarkan bahwa layanan pendidikan dan pelatihan tetap terlaksana dengan baik, namun karena adanya pandemi COVID-19 kegiatannya dilakukan secara online sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara (BPS), Pusdiklat BPS merealisasikan penggunaan

anggaran berdasarkan pagu yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Penggunaan anggaran dilakukan senantiasa mengacu pada prinsip 3E (efektif, efisien, dan ekonomis) dalam menghasilkan output yang berkualitas. Efisiensi diperlukan dalam menggunakan anggaran yang ada dengan bijak untuk merealisasikan rencana kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang maksimal. Dengan adanya angka efisiensi, dapat ditelaah lebih lanjut apakah kinerja organisasi sudah efektif atau hanya pemborosan anggaran. Nilai Efisiensi sebesar 18,94 dapat dikonversi menjadi **97,35%.** Dari nilai efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja kegiatan serta anggaran Pusdiklat BPS sudah sangat baik.

BAB I
PENDAHULUAN

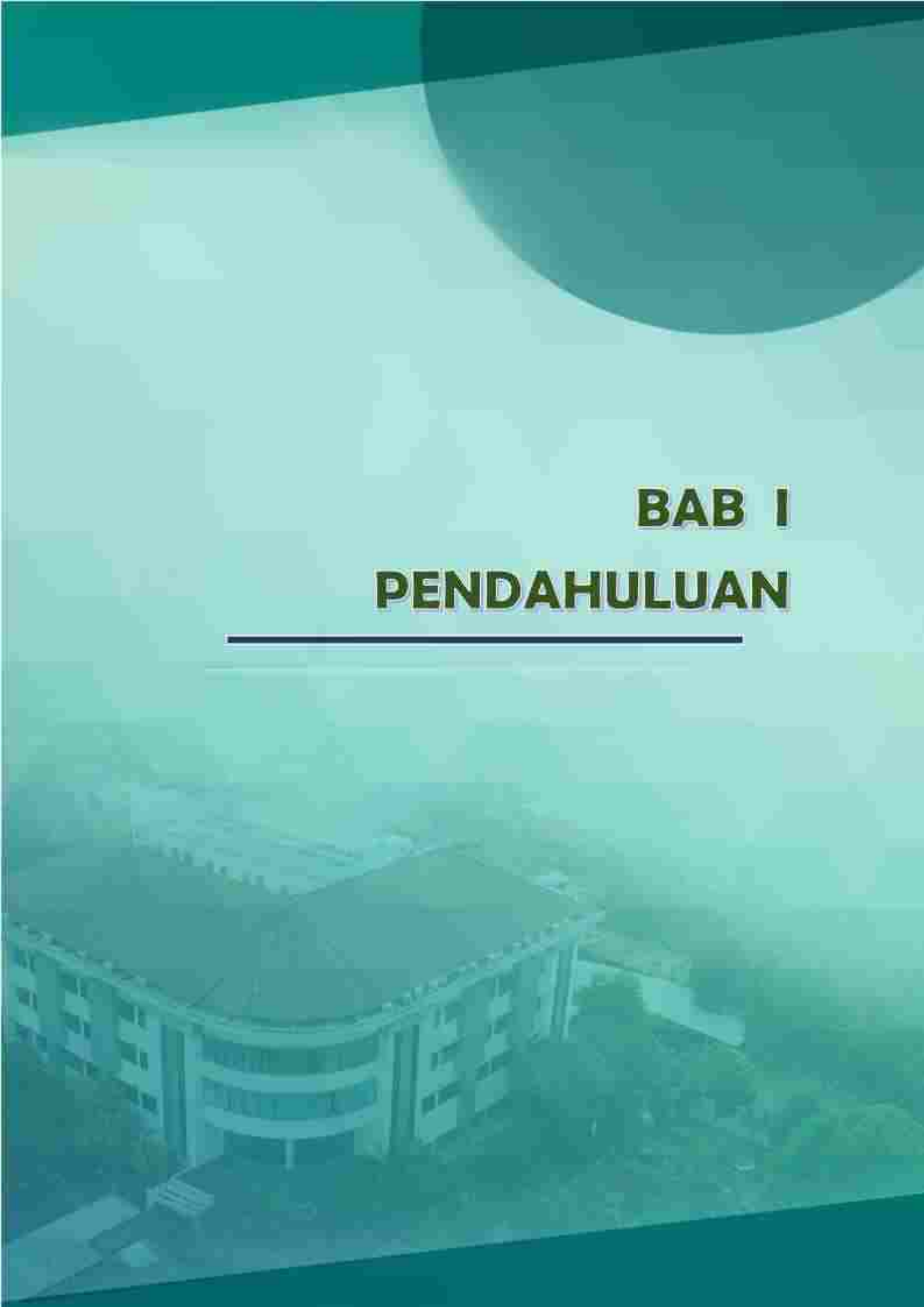

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Reviu dan Evaluasi Kinerja. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja, yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai evaluasi atau upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam meningkatkan kinerjanya untuk tahun yang akan datang, Laporan Kinerja juga menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, terutama indikator-indikator dalam pencapaian kinerja yang telah diraih Satuan Kerja pada Instansi

Pemerintah, dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan (ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014). Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun akan dimonitor setiap triwulan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan pada akhir tahun anggaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan instansi pemerintah non kementerian yang memiliki struktur organisasi di bidang teknis, sekretariatan dan pengawasan. Struktur bidang sekretariatan terdiri dari biro perencanaan, administrasi keuangan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) BPS, biro umum, hubungan masyarakat maupun kepegawaian dan hukum.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengembangkan kompetensi SDM BPS seluruh Indonesia, sebagai satuan kerja (satker)/perangkat organisasi yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Pusdiklat BPS mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, serta teknis dan fungsional.

Pusdiklat BPS adalah unsur pelaksana BPS berperan penting dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara di bidang pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam hal ini pegawai di lingkungan BPS maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) BPS secara umum. Selain itu juga mengelola tugas belajar dan izin belajar serta mengadakan seminar/workshop yang berkaitan dengan statistik dan teknologi informasi. Seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah selama tahun 2021 dituangkan dalam Laporan Kinerja ini.

Dalam menyusun Laporan Kinerja, Pusdiklat BPS mengacu pada pedoman penyusunan laporan kinerja bagi setiap instansi pemerintah tertuang

dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Pusdiklat BPS kepada Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan anggaran dan barang milik Negara dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Pusdiklat BPS selama Tahun Anggaran 2021.

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2008 tentang Badan Pusat Statistik yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

   Pusdiklat merupakan unit kerja setingkat Eselon II pada BPS yang berlokasi di Jalan Raya Jagakarsa No. 70. Jakarta Selatan 12620.

2. Tugas

   Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

3. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud di atas, pusdiklat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Pendidikan dan pelatihan;
b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, teknis, dan fungsional;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan substansif di bidang Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
d. Pelaksanaan tugas administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

4. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, struktur organisasi Pusdiklat adalah sebagai berikut:

1. Kepala

   Kepala Pusdiklat BPS adalah pejabat Eselon IIa

2. Bagian Umum

   Bagian Umum dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha umum dan rumah tangga

3. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. Jumlah kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari analisis jabatan dan beban kerja.

Bagan Struktur Organisasi Pusdiklat BPS dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdiklat BPS

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada akhir tahun 2021, SDM Pusdiklat BPS seluruhnya berjumlah 75 pegawai yang terdiri dari 61% laki-laki (46 orang pegawai) dan 39% perempuan (29 orang pegawai). Dari sisi kepangkatan, terdapat pegawai yang masih mencapai pangkat Pengatur (Golongan II) sebanyak 2 orang, namun sebagian besar SDM sudah mencapai pangkat sebagai Penata (Golongan III) sebanyak 48 orang, serta Pembina (Golongan IV) sejumlah 25 orang (Gambar 2).

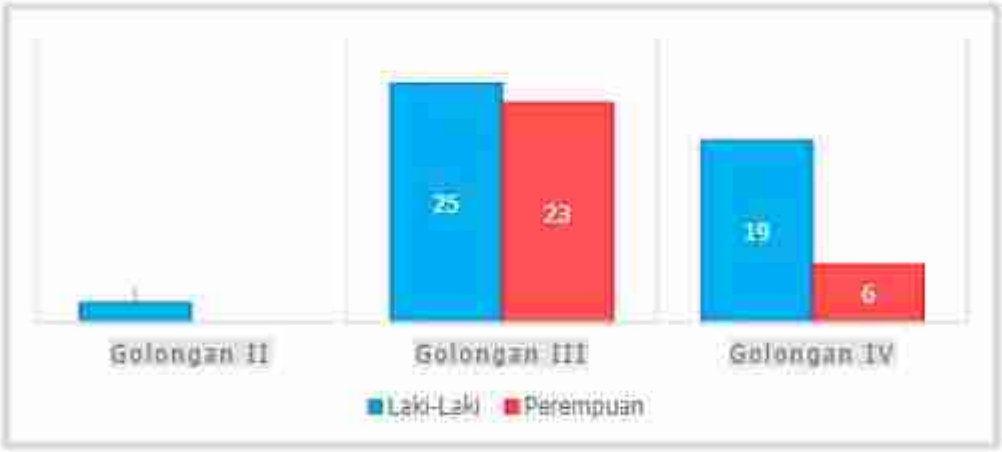

Gambar 2. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Jenis Kelamin dan Kepangkatan

Untuk melaksanakan fungsi sebagai lembaga diklat didukung oleh 3 persen adalah pegawai pejabat struktural, 32 persen adalah pegawai pejabat fungsional widyaiswara, 7 persen fungsional pengembang teknologi pembelajaran, 5 persen fungsional analis kepegawaian, 3 persen fungsional analis pranata komputer, 1 persen fungsional arsiparis, 3 persen fungsional pengelola pengadaan barjas, 3 persen fungsional analis pengelolaan keuangan APBN, 3 persen fungsional pranata keuangan APBN, 36 persen pegawai adalah staf, dan 5 persen pegawai sedang masa tugas belajar (Gambar 3). Masing-masing jabatan tersebut mempunyai peran yang sangat penting untuk pengembangan diklat yang diselenggarakan Pusdiklat BPS.

Gambar 3. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Jabatan

Keberhasilan Pusdiklat BPS dalam menyelenggarakan diklat tidak terlepas dari peranan para pengajar diklat. Pejabat fungsional widyaiswara merupakan SDM Pusdiklat BPS yang berperan sebagai tenaga pengajar diklat. Fungsional widyaiswara di Pusdiklat BPS berjumlah 24 orang terdiri dari 11 orang Fungsional Muda, 11 orang Fungsional Madya, dan 2 orang Fungsional Utama. Semakin berkembangnya diklat yang diselenggarakan di Pusdiklat BPS, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pegawai BPS yang secara tidak langsung juga mendukung data BPS yang lebih berkualitas.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat BPS, dibutuhkan SDM yang berkualitas. Salah satu unsur yang secara tidak langsung berperan dalam peningkatan kualitas SDM adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan Gambar 4 diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2021 komposisi SDM terbesar berada pada tingkat pendidikan S2 yaitu mencapai 44 persen, bahkan sudah ada yang berpendidikan S3 mencapai 8%, selainnya berpendidikan SMA, D1, D3, D4 dan S1. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum SDM Pusdiklat BPS telah mencerminkan kualitas yang cukup baik sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian kinerja ke arah yang lebih baik.

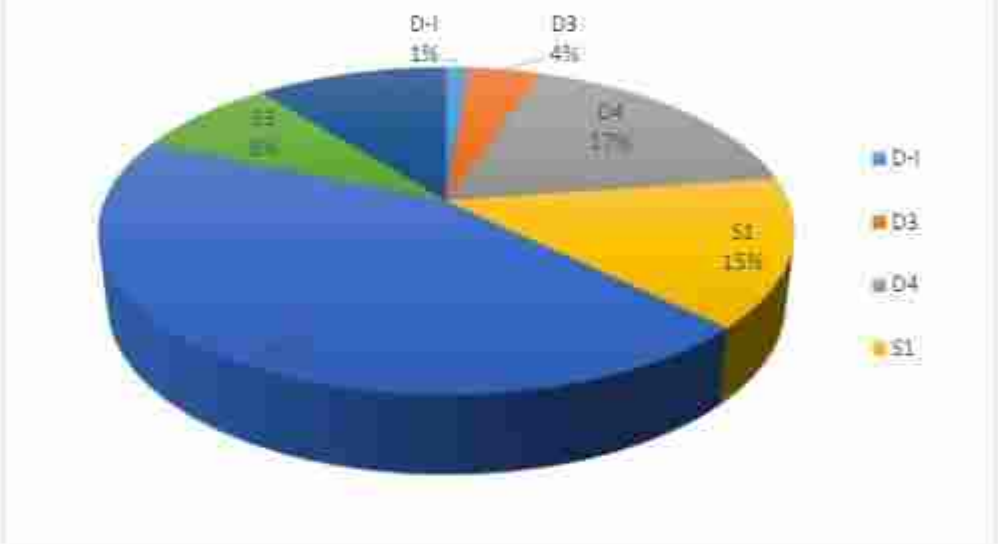

Gambar 4. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Jika dilihat komposisi umurnya, maka Pusdiklat BPS memiliki potensi SDM dari generasi milenial (usia kurang dari 40 tahun) sekitar sepertiganya. Hal ini merupakan potensi untuk mengembangkan Pusdiklat yang adaptif di era transformasi industri. Sedangkan sekitar sepertiganya terdiri dari SDM yang cukup pengalaman dengan usia diatas 50 tahun sehingga bisa dioptimalkan dalam sharing pengalaman untuk pengembangan diklat.

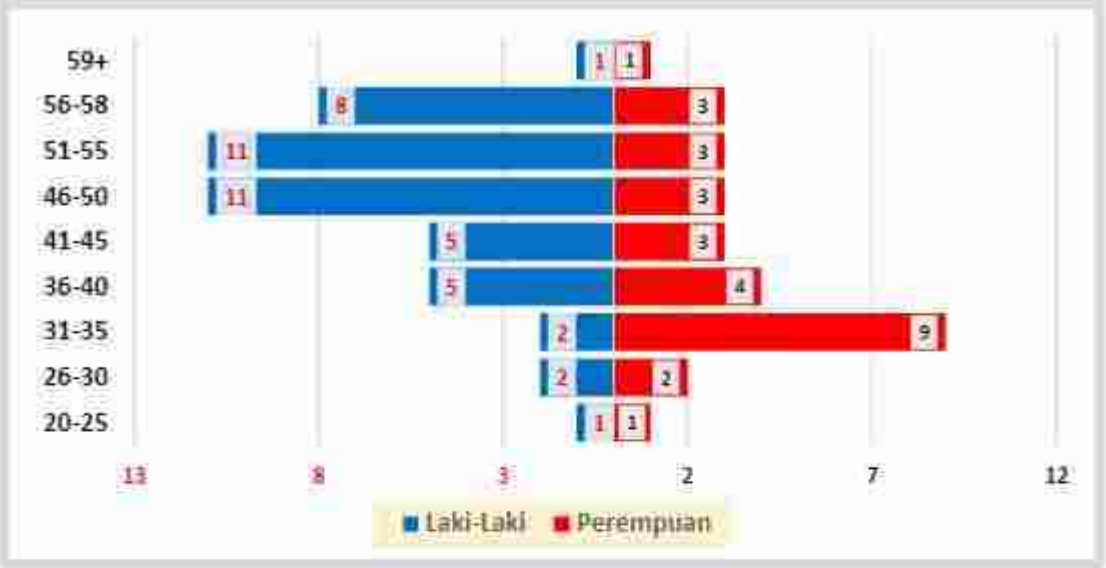

Gambar 5. Distribusi SDM Pusdiklat BPS berdasarkan Kelompok Umur

Selain SDM yang memiliki status PNS, Pusdiklat juga didukung oleh SDM yang masih berstatus Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 32 orang. Dukungan ini diperlukan untuk membantu kegiatan kebersihan dan taman oleh juru bersih dan juru taman, pelayanan tamu oleh resepsionis, transportasi oleh pengemudi, kesehatan oleh perawat, keamanan oleh satpam dan adminstrasi oleh tenaga ilmu komunikasi, hukum dan arsiparis. Kualifikasi Pendidikan PPNPN sangat bervariasi mulai dari SD sampai tamat S1 sesuai dengan keahlian yang diperlukan. Dengan dukungan PPNPN ini menjadi mempermudah dan memperlancar kegiatan pelayanan yang diberikan Pusdiklat kepada *stakeholder*nya.

1.5. Potensi dan Permasalahan

Beberapa hal yang dapat dipetakan sebagai potensi dan permasalahan di pusdiklat BPS adalah sebagai berikut:

1.5.1. Potensi yang Dimiliki

Potensi yang merupakan kekuatan dan peluang yang dapat dikembangkan di Pusdiklat BPS adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan SDM yang berkualitas.

   Pusdiklat BPS memiliki SDM yang berkualitas baik sebagai pengelola (Pejabat Struktural), pengajar/fasilitator (Widyaiswara) dan panitia pelaksana diklat. Berkualitas karena sebagian besar para pengelola telah mengikuti diklat MOT (*Management of Training*), para pengajar/fasilitator telah mengikuti diklat TOT (*Training of Trainers*) dan para panitia telah mengikuti diklat TOC (*Training of Officer Course*). Selain itu hampir semua komponen penyelenggara diklat telah mengikuti TOF (*Training of Officer Facilitator*) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI).

   Khusus untuk pengelolaan TI, di Pusdiklat BPS tersedia SDM yang mampu membuat program, mengelola jaringan serta memiliki kemampuan dalam membuat LMS (*Learning Management System*) untuk pelaksanaan Diklat jarak jauh berbasis *web*.

2. Tersedianya infrastruktur/sarana prasarana diklat yang memadai.

   Pusdiklat BPS didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, seperti peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk keperluan operasional dalam menunjang kegiatan diklat, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium komputer, sarana prasarana olah raga dan seni, mushola, dan lain-lain yang memberi kenyamanan bagi peserta diklat. Di samping itu Pusdiklat BPS memiliki sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sudah cukup memadai.

3. BPS sebagai lembaga pembina jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer

   Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang

Jabatan Fungsional Statistisi Dan Angka Kreditnya Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi adalah Badan Pusat Statistik (BPS)". Selanjutnya pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer Dan Angka Kreditnya Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah Badan Pusat Statistik". Dengan adanya kedua peraturan ini, maka Pusdiklat BPS selain sebagai penyelenggara diklat Fungsional Statistisi dan diklat Fungsional Pranata Komputer, juga mempunyai wewenang untuk mengakreditasi lembaga diklat lain yang ingin menyelenggarakan kedua jenis diklat tersebut.

4. Mampu melaksanakan diklat berskala internasional.

   Pusdiklat BPS telah mampu berkolaborasi dengan lembaga internasional untuk pelaksanaan diklat di masa pandemi. IMF telah memberikan *Technical Assistance for Online Training on Producer Price Index for Services.*

5. Pusdiklat BPS berpeluang menciptakan diklat-diklat baru.

   Peluang ini berkenaan dengan banyaknya permintaan kerjasama dari *stakeholders* untuk menyelenggarakan diklat teknis baru. Untuk menciptakan sebuah diklat baru dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pembuatan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), penyusunan Kurikulum dan pembuatan modul. Pusdiklat BPS telah beberapa kali membuat diklat baru seperti diklat Teknis Statistik Sektoral dan Diklat Teknis Administrasi Pranata komputer. Semua diklat baru tersebut juga telah diselenggarakan dengan baik.

6. Pusdiklat BPS berperan dalam diklat teknis statistik sektoral bagi aparat BPS dan aparat K/L/D/I.

   Penyelenggaraan diklat pengelolaan statistik sektoral adalah peluang baru bagi pusdiklat dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dalam hal peningkatan kompetensi

penyelenggaraan statistik sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan diklat sektoral ini di dilakukan melalui koordinasi dengan *subject matter* di BPS.

7. Pusdiklat BPS memiliki sarana dan prasarana penginapan untuk peserta diklat.

   Di masa Pandemi meningkat pada level 1, Pusdiklat dBPS telah berperan serta mengambil bagian dalam penyediaan tempat isolasi mandiri (Wisma CSS) dalam rangka penanganan Covid-19.

8. Agenda reformasi birokrasi.

   Pertimbangan dalam menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, Pusdiklat BPS melakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Pada masa transisi masih tersedia Jabatan Koordinator Fungsi dan Sub Koordinator Fungsi yang memiliki fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan kerja sesuai bidang tugasnya dalam satuan kerjanya, sehingga hal ini merupakan salah satu potensi yang ada dalam mempermudah dan memperlancar pencapaian tujuan organisasi.

1.5.2. Permasalahan yang Dihadapi

Pusdiklat BPS telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan, baik itu kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi, maupun tantangan yang bersumber dari luar organisasi. Adapun beberapa tantangan/permasalahan tersebut adalah:

1. Keterbatasan fasilitas media tatap muka online seperti zoom
2. Belum optimalnya tenaga pengajar dan fasilitator;
3. Masih terdapat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang disebabkan peserta tugas belajar yang tidak lulus;

4. Sarana prasarana yang mendukung tugas dan fungsi Bagian/Bidang yang adaptif;
5. Perubahan struktur birokrasi;
6. Adanya pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia;
7. Peraturan penyelenggaraan diklat yang terus berkembang;
8. Perkembangan TIK di era disrupsi digital.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja Pusdiklat BPS tahun 2020 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. **Pendahuluan**, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan; tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumberdaya manusia (SDM); potensi dan permasalahan; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. **Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS 2021.

Bab III. **Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Pusdiklat BPS 2020; Capaian Kinerja Pusdiklat BPS terhadap Target Renstra 2020-2024; Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS 2021; Upaya Efisiensi Pusdiklat BPS 2021; Realisasi Anggaran tahun 2021; dan Penghargaan tahun 2020

Bab IV. **Penutup**, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, Pusdiklat BPS menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra tersebut dijadikan sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja seluruh aparat Pusdiklat BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan pembangunan statistik, utamanya dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Sejalan dengan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang menyelenggarakan diklat, Renstra Pusdiklat BPS 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang berkontribusi untuk pengembangan SDM. Visi yang disusun Pusdiklat BPS untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2020-2024 adalah:

> **"Menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Unggul dan Adaptif"**

Visi Pusdiklat BPS tersebut searah dengan visi Sekretariat Utama BPS yaitu: "Menyediakan dan mengembangkan SDM yang unggul dan adaptif dalam rangka menghasilkan statistik yang berkualitas".

Pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah (PIA) menjadi sangat penting diwujudkan dalam rangka pembangunan bidang SDM.

Profesional

"Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas".

Integritas

"Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)".

Amanah

"Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik".

Dengan Visi Pusdiklat BPS 2020-2024, eksistensi Pusdiklat BPS sebagai pusat pendidikan dan pelatihan statistik menjadi semakin penting, karena sangat berperan dalam pembangunan bidang SDM guna menunjang upaya BPS meningkatkan penyediaan data yang berkualitas. Selain itu, visi Pusdiklat BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dan berperan aktif di bidang statistik melalui keikutsertaan aparaturnya dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat BPS.

Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam mewujudkan BPS Corporate University.
2. Mengelola dan mengembangkan kompetensi SDM yang relevan dengan kebutuhan terkini.

3. Mengelola dan mengembangkan layanan pendidikan dan pelatihan serta sarana prasarana yang modern dan akuntabel.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pusdiklat BPS 2020-2024, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Berdasarkan Renstra tersebut, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis
T1. Meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif	SS1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku
	SS2. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam Kerangka Satu Data Indonesia
T2. Meningkatkan kompetensi SDM	SS3. Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi
	SS4. Terjalinnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan
	SS5. Penguatan manajemen internal dan sumberdaya

Tabel 1 di atas merupakan Reviu Renstra pada tahun 2021. Sebelumnya Pusdiklat BPS mempunyai dua tujuan dan empat sasaran strategis, kemudian dilakukan reviu sehingga menjadi dua tujuan dan lima sasaran strategis yang masing-masing memiliki indikator yang terukur sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerjanya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pusdiklat BPS dapat dilihat pada gambar 5 berikut:

Gambar 6. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS Tahun 2021

Pada awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Target yang telah ditetapkan menjadi acuan capaian atau realisasi kinerja instansi. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Di dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS, target yang ditetapkan berasal dari beberapa indikator kinerja yang dapat mewakili hasil kinerja dari masing-masing sasaran strategis. Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitor setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif			
Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku	Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	90
Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam Kerangka Satu Data Indonesia	Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral	Persen	85
Tujuan 2. Meningkatkan kompetensi SDM			
Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi	Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	Persen	90

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Terjalinnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan	Persentase kelulusan peserta tugas belajar	Persen	90
Penguatan manajemen internal dan sumberdaya	Hasil penilaian SAKIP	Poin	70
	Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur	Persen	90

Perjanjian Kinerja yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam perjanjian kinerja pada tingkat unit kerja Eselon III dan Eselon IV. Karena itu setiap unit kerja mempunyai kontribusi terhadap penyusunan target kinerja Pusdiklat BPS. Peranan unit kerja Eselon III pada setiap penyusunan target indikator dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator

Sasaran/Indikator	Bagian Tata Usaha	Bidang DPK	Bidang DTF
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Strategis 1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku			
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	*	*	*

Sasaran/Indikator	Bagian Tata Usaha	Bidang DPK	Bidang DTF
Sasaran Strategis 2. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam Kerangka Satu Data Indonesia			
Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral	*	*	■
Sasaran Strategis 3. Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi			
Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	■	■	■
Sasaran Strategis 4. Terjalinnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan			
Persentase kelulusan peserta tugas belajar	■	*	*
Sasaran Strategis 5. Penguatan manajemen internal dan sumberdaya			
Hasil penilaian SAKIP	■	*	*
Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur	■	*	*

Keterangan: ■ : Penanggung Jawab * : Kontributor

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2021

Capaian kinerja Pusdiklat BPS tahun 2021 diperoleh berdasarkan pencapaian dari indikator-indikator kinerja sasaran strategis selama tahun 2021. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Indikator kinerja yang dimaksud merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target pada Perjanjian Kinerja 2021 dan data realisasinya dapat diperoleh sesuai kegiatan yang dilakukan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pusdiklat BPS. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, begitu pula sebaliknya.

3.2. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari rencana strategis untuk lima tahun ke depan. Pada tahun ini Pusdiklat BPS mempunyai dua tujuan capaian kinerja yaitu (1) **Meningkatkan Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Yang Adaptif** dan (2) **Meningkatkan Kompetensi SDM**. Tujuan pertama dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku, dan Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam Kerangka Satu Data Indonesia. Sementara itu, untuk tujuan kedua dicapai dengan tiga sasaran strategis, yaitu: (1) Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi, (2) Terjalinnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang

berkesinambungan, (3) Penguatan manajemen internal dan sumberdaya. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur beberapa sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

Dari lima sasaran strategis yang telah ditentukan, secara umum diperoleh rata-rata capaian kinerja indikator sasaran strategis pada tahun 2021 sebesar 106,76 persen (Tabel 4). Dengan angka diatas 100 persen, diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja telah melampaui dari target yang telah ditentukan. Keberhasilan ini merupakan capaian dan kerja keras dari *teamwork* seluruh pegawai Pusdiklat BPS dan dukungan dari *stakeholder* yang terlibat dalam mewujudkan tujuan meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif dan meningkatkan kompetensi SDM.

Tabel 4. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1: Meningkatkan Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Yang Adaptif				
SS1: Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku				
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	90	90	100,00
SS2: Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam Kerangka Satu Data Indonesia				
Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral	Persen	85	100	117,65
T2: Meningkatkan kompetensi SDM				
SS3: Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi				
Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	Persen	90	100	111,11
SS4: Terjalinnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan				
Persentase kelulusan peserta tugas belajar	Persen	90	100	111,11

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
SS5: Penguatan manajemen internal dan sumberdaya				
Hasil penilaian SAKIP	Poin	70	64,72	92,46
Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur	Persen	90	97,46	108,29
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 2021				**106,76**
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 2020				**106,07**

Bila diperhatikan pada Tabel 4, keberhasilan Pusdiklat BPS dalam mencapai target kinerja melebihi dari yang telah ditargetkan, tidak terlepas dari peranan masing-masing indikator kinerja yang memberikan sumbangan cukup besar dalam mencapai target yang telah ditentukan. Pada indikator sasaran strategis pertama yaitu persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00 persen.

Salah satu hal yang dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan penyelenggaraan diklat adalah evaluasi diklat. Evaluasi diklat dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas diklat. Evaluasi yang dilakukan pada saat diklat berlangsung secara umum adalah evaluasi peserta terhadap pengajar, sarana dan prasarana ruang kelas, ruang laboratorium, ruang kamar/asrama, konsumsi peserta, dan lain-lain yang menunjang pembelajaran. Namun, karena pada tahun 2021 masih dalam kondisi Pandemi Corona Virus (COVID-19) sehingga terdapat perubahan metode pembelajaran dari tatap muka menjadi *online* (jarak jauh). Untuk itu evaluasi dilakukan berbeda pada umumnya, yaitu (1) Evaluasi terhadap Widyaiswara/Pengajar; (2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan, bahan dan materi pelatihan, serta LMS; dan (3) Evaluasi terhadap penguji, *coach*, dan mentor. Kriteria terhadap penilaian tersebut adalah kurang, cukup, baik, memuaskan, dan sangat memuaskan.

Berdasarkan evaluasi peserta pada akhir pelatihan, Peserta menyatakan secara umum widyaiswara/pengajar/fasilitator mendapatkan nilai 92,99 yang berarti sudah masuk kategori sangat baik. Untuk evaluasi terhadap

penyelenggaraan, bahan dan materi pelatihan, serta LMS menunjukkan bahwa sebesar 2 persen menyatakan cukup, 9 persen menyatakan baik, 39 persen menyatakan memuaskan, dan 50 persen menyatakan sangat memuaskan. Sedangkan untuk evaluasi peserta bagi penguji, *coach*, dan mentor adalah sebagai berikut, sebesar 2 persen menyatakan baik, 19 persen menyatakan memuaskan, dan sebesar 79 persen menyatakan sangat memuaskan.

Selain evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat, diperlukan juga Evaluasi Pasca Diklat (EPD). EPD merupakan alat untuk mendiagnosis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan diklat. Dengan EPD, keberhasilan dan kekurangan diklat dapat dianalisis lebih lanjut. Hasil EPD akan menjadi masukan (*feedback*) yang sangat penting dalam memperbaiki kualitas diklat dan menjaga keberlanjutan organisasi penyelenggara diklat. EPD menjadi alat ukur serta merupakan proses evaluasi diklat yang komprehensif untuk menangkap adanya kontribusi pengembangan SDM. Hasilnya akan memberikan data penting kepada semua pemangku kepentingan yang dapat dijadikan alat komunikasi bagi pengembangan SDM kepada organisasi.

Hasil dari kegiatan EPD menunjukkan bahwa tingkat kinerja alumni pelatihan kepemimpinan baik PKA maupun PKP dan Latsar CPNS secara umum memuaskan. Implementasi proyek perubahan alumni PKP dan PKA dalam jangka menengah dan panjang sudah cukup baik, mulai banyak proyek perubahan yang dilakukan alumni peserta pelatihan kepemimpinan menjadi salah satu bagian inovasi di unit kerjanya. Sedangkan kesinambungan aktualisasi substansi alumni Latsar CPNS berjalan dengan baik serta bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di unit kerja. Rekomendasi yang penting dilakukan dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan adalah melakukan monitoring secara berkala terhadap implementasi proyek perubahan jangka menengah dan panjang serta perlunya variasi bentuk inovasi dalam proyek perubahan dimana selama ini didominasi oleh bentuk aplikasi program komputer. Sedangkan untuk penyelenggaraan Latsar CPNS diantaranya

peningkatan disiplin peserta tidak hanya saat pelatihan namun sampai kembali di unit kerja serta penerapan nilai-nilai dasar ANEKA.

Capaian kinerja pada indikator sasaran strategis kedua yaitu persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi adalah sebesar 111,11 persen. Peningkatan kompetensi terhadap pegawai dilakukan dalam rangka menunjang layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Negara BPS, sehingga diperoleh SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan, *workshop*, seminar, dan lain-lain baik sebagai peserta, pengajar, narasumber, maupun panitia penyelenggara.

Indikator sasaran strategis ketiga yang juga menunjukkan capaiannya lebih dari 100 persen adalah persentase kelulusan peserta tugas belajar dengan persentase sebesar 111,11 persen. Hal ini terjadi berkat terjalinnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan sesuai sasaran strategis yang ingin dicapai.

3.3. Perkembangan Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2021 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan yang tertuang dalam indikator kinerja.

Dalam rangka mewujudkan visi Pusdiklat BPS yaitu **"Menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Unggul dan Adaptif"**, telah ditetapkan dua tujuan capaian kinerja dan empat indikator sasaran strategis seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab 3.1. Bila dilihat perkembangannya bahwa rata-rata capaian indikator sasaran strategis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada Tabel 5. Hal ini menggambarkan bahwa perbaikan kinerja terus-

menerus dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh pegawai dalam mewujudkan visi dan misi Pusdiklat BPS.

Tabel 5. Perbandingan rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis Pusdiklat BPS Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Rata-rata Capaian Indikator Sasaran (%)
1.	2018	103,61
2.	2019	103,65
3.	2020	106,07
4.	2021	106,76

Berkaitan dengan adanya perubahan visi, misi, tujuan, serta indikator sasaran dalam kurun waktu lima tahunan pada Renstra 2015-2019 dengan Renstra 2020-2024, sehingga perbandingan dilakukan hanya berdasarkan capaian rata-rata indikator sasaran, dan beberapa indikator yang terdapat pada tahun 2020 dan 2021.

Sasaran 1 : Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan yang Sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi Informasi Mutakhir, dan Aturan yang Berlaku

Pengembangan sumber daya manusia (*human resources development/HRD*) merupakan bagian dari proses bisnis sebuah organisasi. Bagi organisasi publik, untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang tinggi, diperlukan peningkatan mutu dan pengembangan wawasan pegawainya. Upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah dalam peningkatan mutu profesionalisme dan pengembangan wawasan Aparatur Sipil Negara adalah melalui program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pusdiklat BPS dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara diklat, ingin mewujudkan layanan diklat yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku sesuai dengan sasaran strategis pertama pada Perjanjian

Kinerja Tahun 2021. Dalam mewujudkan keberhasilan sasaran tersebut, capaian kinerja diukur melalui indikator persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat.

Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2021

IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Realisasi 2020	Perubahan terhadap realisasi 2020 (%) ((3)/(5)*100)-100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	90	90	100,00	93,14	-3,37

IKU 1: Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat

Penyelenggaraan diklat dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama antara penyelenggara, peserta diklat, dan pengajar/widyaiswara. Dalam upaya pelaksanaan diklat yang lebih baik dan peningkatan mutu penyelenggaraan diklat, perlu diketahui seberapa jauh kemampuan para peserta dalam menyerap materi, kemampuan dan kualitas tenaga pengajar/widyaiswara terhadap materi yang diberikan di kelas, serta pelayanan penyelenggara dan sarana prasarana yang memadai. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan penyelenggara terhadap kegiatan diklat yang diadakan oleh Pusdiklat BPS, peserta diminta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan melalui saran-saran dan komentar, baik terhadap pengajar maupun penyelenggara. Melalui evaluasi tersebut dapat diketahui kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat.

Kepuasan peserta diklat merupakan salah satu yang dijadikan indikator capaian kinerja untuk memenuhi sasaran terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan. Tinggi rendahnya capaian kinerja yang diperoleh menjadi salah satu

acuan bagi Pusdiklat BPS agar dapat meningkatkan mutu pelayanan diklat ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Untuk mengetahui capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dilihat melalui besarnya realisasi terhadap target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada indikator kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat adalah sebesar 100 persen. Angka tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 90 persen dibandingkan target PK 2021 yaitu sebesar 90 persen. Tingkat capaian yang diperoleh sama dengan yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang sebesar 93,14 persen, maka terjadi penurunan sebesar -3,37 persen.

Realisasi kepuasan penyelenggaraan diklat tahun 2021 adalah sebesar 90 persen sehingga capaian terhadap indicator tersebut adalah sebesar 100 persen. Sedangkan nilai persentase kepuasan penyelenggaraan diklat berdasarkan jenis pelatihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Nilai Persentase Kepuasan Penyelenggaraan Diklat Tahun 2021

No.	Nama Pelatihan	Periode Pelatihan	Persentase Kepuasan Penyelenggaraan	Capaian
Pelatihan Dasar CPNS				
1.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 2 Angkatan ke-6	23 Agustus – 6 November 2021	98	Tercapai
2.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 2 Angkatan ke-7		98	Tercapai
3.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 2 Angkatan ke-8	30 Agustus – 15 November 2021	93	Tercapai
4.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-60	21 Juni – 9 September 2021	79	Tidak tercapai
5.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-61		85	Tidak tercapai
6.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-62	28 Juni – 16 September 2021	90	Tercapai
Pelatihan Dasar CPNS				
7.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-63		87	Tidak tercapai

No.	Nama Pelatihan	Periode Pelatihan	Persentase Kepuasan Penyelenggaraan	Capaian
8.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-64	5 Juli – 23 September 2021	95	Tercapai
9.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-65	12 Juli – 30 September 2021	90	Tercapai
10.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-66	19 Juli – 7 Oktober 2021	86	Tidak tercapai
11.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-67		77	Tidak tercapai
12.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-68	26 Juli – 9 Oktober 2021	90	Tercapai
13.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-69	2 Agustus – 16 Oktober 2021	87	Tidak tercapai
14.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-70	9 Agustus – 23 Oktober 2021	93	Tercapai
15.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-71	16 Agustus – 30 Oktober 2021	90	Tercapai
Pelatihan Kepemimpinan				
16.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan ke-2	28 Juni – 15 Oktober 2021	99	Tercapai
17.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan ke-5	25 Januari – 17 Juni 2021	85	Tidak tercapai
18.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan ke-6	1 Februari – 24 Juni 2021	95	Tercapai
19.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan ke-7	8 Februari – 1 Juli 2021	98	Tercapai
20.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan ke-8	15 Februari – 8 Juli 2021	99	Tercapai
Pelatihan Manajerial				
21.	Workshop Kepemimpinan Angkatan ke-1	14 Juni 2021	94	Tercapai
22.	Workshop Kepemimpinan Angkatan ke-2	21 Juni 2021	91	Tercapai
23.	*Executive Development Programm* (EDP) Kelas A	26 – 28 Juli 2021	84	Tidak tercapai
24.	*Executive Development Programm* (EDP) Kelas B		65	Tidak tercapai
25.	*Executive Development Programm* (EDP) Kelas C		83	Tidak tercapai

No.	Nama Pelatihan	Periode Pelatihan	Persentase Kepuasan Penyelenggaraan	Capaian
26.	*Executive Development Programm* (EDP) Kelas D		94	Tercapai
27.	*Executive Development Programm* (EDP) Kelas E		90	Tercapai
28.	*Executive Development Programm* (EDP) Kelas F		87	Tidak tercapai
29.	*Executive Development Programm* (EDP) Kelas G		95	Tercapai
30.	*Executive Development Programm* (EDP) Kelas H		89	Tidak tercapai
Pelatihan Manajerial				
31.	*Executive Development Programm* (EDP) Kelas I	3 – 5 Agustus 2021	87	Tidak tercapai
Pelatihan Manajerial				
32.	*Executive Development Programm* (EDP) Kelas J		90	Tercapai
33.	*Executive Development Programm* (EDP) Kelas K		97	Tercapai
34.	*Executive Development Programm* (EDP) Kelas L		93	Tercapai
35.	*Executive Development Programm* (EDP) Kelas M		86	Tidak tercapai
36.	*Executive Development Programm* (EDP) Kelas N		97	Tercapai
37.	*Executive Development Programm* (EDP) Kelas O		85	Tidak tercapai
38.	*Executive Leader Workshop*	September 2021	90	Tercapai

Adanya penurunan capaian kinerja dapat digunakan sebagai pendorong ke arah yang lebih baik lagi dalam melakukan peningkatan layanan diklat. Perbaikan terjadi berkat kerjasama dan komitmen para penyelenggara dan pengajar untuk selalu memperbaiki layanan berdasarkan masukan dari peserta.

Widyaiswara/pengajar sebagai ujung tombak dalam mentransfer ilmu kepada peserta diklat dapat menyampaikan materi dengan baik. Hal ini tentunya atas semangatnya dengan terus mengembangkan kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang berlaku serta teknologi dan informasi menuju era digitalisasi.

Dalam rangka menunjang era digitalisasi terutama untuk memfasilitasi metode pembelajaran secara *online* telah dilakukan penyempurnaan sarana dan prasarana kebutuhan diklat terutama yang berkaitan dengan teknologi dan informasi. Sarana prasarana pendukung pembelajaran dalam bentuk *learning management system* dan pendukung adminsitrasi dalam bentuk *smart office*.

Di sisi lain untuk menunjang kenyamanan peserta dalam mengikuti diklat tatap muka, telah dilakukan pembenahan fasilitas-fasilitas seperti kamar asrama, kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya melalui pemeliharaan bangunan dan gedung. Untuk meningkatkan sarana diklat di bidang kesehatan dan hiburan, Pusdiklat BPS menyediakan fasilitas alat-alat fitness, kursi pijat elektrik, dan alat musik karaoke yang berada di ruang khusus di gedung basement. Sarana tersebut diharapkan dapat menambah fasilitas peserta sebagai penunjang kesehatan dan hiburan di sela-sela kesibukan mengikuti diklat. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan sarana prasarana diklat tersebut juga merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat.

Target dan realisasi persentase kepuasan peserta dihitung berdasarkan penyelenggaraan diklat, baik diklat prajabatan dan kepemimpinan maupun diklat teknis dan fungsional. Pembinaan pegawai melalui diklat prajabatan dan kepemimpinan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM baik dari sisi kemampuan teknis maupun manajerial untuk mendukung kelancaran tugas sebagai Aparatur Sipil Negara. Sementara itu, diklat teknis dan fungsional diselenggarakan untuk menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan peningkatan kompetensi pada pegawai yang menduduki jabatan fungsional.

Tabel 8. Jenis dan Jumlah Pelatihan Tahun 2021

No.	Jenis Pelatihan	Periode Bulan Pelatihan	Jumlah Pelatihan		Capaian
			Target	Realisasi	
1.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan 2	Agustus - November	2	3	Tercapai

No.	Jenis Pelatihan	Periode Bulan Pelatihan	Jumlah Pelatihan		Capaian
			Target	Realisasi	
2.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan 3	Juni – Oktober	12	12	Tercapai
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Januari – Juli	4	4	Tercapai
4.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Juni – Oktober	1	1	Tercapai
5.	Pelatihan Manajerial	Juli - September	8	18	Tercapai

Informasi tentang diklat-diklat yang telah diselenggarakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan

1.1. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok PNS tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya. Untuk memenuhi hal tersebut perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan yang mengarah ke peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air. Disamping itu, juga memperhatikan kompetensi teknis, manajerial dan atau kepemimpinan serta efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), antara lain ditetapkan jenis-jenis Diklat PNS. Salah satu jenis Diklat adalah Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III yang merupakan syarat pengangkatan CPNS untuk menjadi PNS Golongan III.

Pada tahun 2021, target peserta Latsar CPNS adalah sebanyak 510 orang, yang terdiri dari 82 orang golongan II dan 428 orang golongan III. Pada realisasinya, jumlah peserta yang Latsar CPNS Golongan II adalah sebanyak 96 orang peserta yang terdiri dari BPS dan Kemenparekraf. Sedangkan jumlah peserta Latsar CPNS Golongan III sebanyak 428 orang peserta. Akan tetapi, pada waktu pelaksanaan Latsar terdapat 1 (satu) orang peserta yang tidak bisa melanjutkan pelatihan dikarenakan sakit dan harus menjalani pengobatan intensif sehingga jumlah akhir peserta Latsar CPNS Golongan III adalah sebesar 427 orang. Sehingga total jumlah peserta Latsar CPNS pada tahun 2021 adalah sebanyak 523 orang.

Tabel 9. Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS yang Dilaksanakan Tahun 2021

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta		Capaian
		Target	Realisasi	
1.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 2 Angkatan ke-6	32	32	Tercapai
2.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 2 Angkatan ke-7	32	32	Tercapai
3.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 2 Angkatan ke-8	18	32	Tercapai
4.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-60	33	33	Tercapai
5.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-61	33	33	Tercapai
6.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-62	38	38	Tercapai
7.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-63	33	33	Tercapai
8.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-64	33	33	Tercapai
9.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-65	38	38	Tercapai
10.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-66	33	33	Tercapai
11.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-67	33	33	Tercapai
12.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-68	39	39	Tercapai
13.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-69	39	39	Tercapai

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta		Capaian
		Target	Realisasi	
14.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-70	38	38	Tercapai
15.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-71	38	37	Tidak tercapai
	Total Jumlah Peserta	**510**	**523**	**Tercapai**

Latsar CPNS merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Pelatihan ini dilaksanakan untuk menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pada tahun 2021 capaian persentase kelulusan peserta Latsar CPNS dengan kategori memuaskan adalah sebesar 99.81, lebih besar dari target 95 persen sehingga target persentase kelulusan peserta pelatihan dengan kategori minimal memuaskan tercapai.

Tabel 10. Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Dasar CPNS yang Lulus Memuaskan Tahun 2021

No.	Nama Pelatihan	Persentase Lulus Memuaskan		Capaian
		Target	Realisasi	
1.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 2 Angkatan ke-6	95	100	Tercapai
2.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 2 Angkatan ke-7	95	100	Tercapai
3.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 2 Angkatan ke-8	95	100	Tercapai
4.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-60	95	100	Tercapai
5.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-61	95	100	Tercapai
6.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-62	95	100	Tercapai
7.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-63	95	100	Tercapai
8.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-64	95	100	Tercapai
9.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-65	95	100	Tercapai
10.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-66	95	100	Tercapai

No.	Nama Pelatihan	Persentase Lulus Memuaskan		Capaian
		Target	Realisasi	
11.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-67	95	100	Tercapai
12.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-68	95	100	Tercapai
13.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-69	95	100	Tercapai
14.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-70	95	100	Tercapai
15.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. 3 Angkatan ke-71	95	97.3	Tercapai
	Rata-rata	**95**	**99,81**	**Tercapai**

Memasuki era revolusi industri 4.0 maka arus globalisasi juga mulai masuk ke Indonesia dengan fenomena *disruptive innovation*. Untuk menghadapi tantangan tersebut, PNS memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing baik nasional maupun regional. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan desain diklat yang tepat bagi CPNS sebagai awal pembentukan karakter dan kompetensi sesuai tuntutan jabatannya. Oleh karena itu, penyempurnaan dan pengayaan konsep Diklat Prajabatan terus dikembangkan menjadi desain diklat terintegrasi menjadi Pelatihan Dasar CPNS (Latsar CPNS), melalui Peraturan LAN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Latsar CPNS.

Gambar 7. Kegiatan Pembekalan terhadap Peserta Latsar CPNS Tahun 2021

Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Latsar CPNS yang disesuaikan dengan dinamika pengembangan kompetensi, maka dilakukan perubahan metode dan mekanisme penyelenggaraan pelatihan dasar bagi CPNS. Hal

tersebut disesuaikan dengan terbitnya Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS karena peraturan sebelumya dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengembangan kompetensi. Pada PerLAN tersebut pola pembelajaran disesuaikan dengan menekankan pada konsep *blended learning*. Pola Pembelajaran *blended learning* terdiri dari 3 (tiga) tahap pembelajaran, yaitu pembelajaran mandiri (MOOC, *massive open online course*), *distance learning*, dan pembelajaran klasikal. MOOC dilaksanakan selama 16 hari kerja atau 48 Jam Pelatihan (JP), *distance learning* melalui *e-learning* dilaksanakan secara terstruktur selama 217 JP atau setara dengan 22 hari kerja, aktualisasi dilaksanakan di unit kerja peserta selama 30 hari kerja atau setara dengan 320 JP, serta pembelajaran klasikal di Lembaga pelatihan penyelenggara Latsar CPNS dengan jumlah jam pembelajaran sebanyak 62 JP atau setara dengan 6 hari kerja.

Penyelenggaraan Latsar CPNS di Pusdiklat BPS dilakukan sejak bulan Juni sampai November 2021.

1.1.1. Pelatihan Dasar CPNS Golongan II

Pada tahun 2021, Pusdiklat BPS melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II. Walaupun kondisi pandemi Covid-19, kegiatan Latsar CPNS Golongan II tetap dapat dilaksananakan dengan pola pembelajaran *blended learning*. Pada saat tahap pembelajaran klasikal atau tatap muka langsung, kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan prosedur kesehatan ketat dan izin dari Satgas setempat.

Struktur kurikulum Pelatihan Dasar CPNS Golongan II terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Kurikulum Pembentukan Karakter PNS dan Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. Kurikulum pembentukan karakter PNS, terdiri dari 4 (empat) Agenda, yaitu Agenda Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda Nilai-nilai Dasar PNS, Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, dan Agenda Habituasi. Sedangkan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas terdiri dari 2 (dua), yaitu Kompetensi teknis administratif dan Kompetensi teknis substantif.

Gambar 8. Kegiatan Pembinaan Sikap Perilaku Latsar CPNS Golongan II

Metode pembelajaran yang digunakan dalam Pelatihan Dasar CPNS Golongan II ini adalah ceramah yang dikombinasi dengan tanya jawab, diskusi kelompok, permainan, pendalaman materi, dan seminar. Pada tahun 2021 Pusdiklat BPS melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II sebanyak 3 angkatan yaitu Angkatan ke-6 s.d. 8 dengan total peserta sebanyak 96 orang, yang terdiri dari BPS dan Kemenparekraf. Peserta merupakan formasi CPNS BPS tahun 2020 yang berasal dari lulusan Program Diploma III Politeknik Statistika STIS dan Politeknik Keuangan STAN tahun 2020 serta formasi CPNS Kemenparekraf.

Gambar 9. Kegiatan Pembelajaran Distance Learning dan Klasikal Latsar CPNS Golongan II

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk nilai-nilai dasar profesi PNS. Kompetensi ini yang berperan dalam membentuk karakter PNS yang kuat, yaitu PNS yang mampu bersikap dan bertindak profesional dalam melayani masyarakat dan bertujuan untuk membentuk PNS yang profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi PNS, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

Gambar 10. Kegiatan Seminar Rancangan dan Evaluasi Aktualisasi Latsar CPNS Golongan II

1.1.2. Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Pada tahun 2021, Pusdiklat BPS juga menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. Berdasarkan Peraturan LAN RI Nomor 12 Tahun 2018, pelaksanaan Latsar CPNS Golongan III juga dilakukan dengan pola pembelajaran *blended learning*.

Gambar 11. Kegiatan Pembelajaran Agenda Sikap Perilaku Bela Negara Latsar CPNS Golongan III

Struktur kurikulum Pelatihan Dasar CPNS Golongan III terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Kurikulum Pembentukan Karakter PNS dan Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. Kurikulum pembentukan karakter PNS, terdiri dari 4 (empat) Agenda, yaitu Agenda Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda Nilai-nilai Dasar PNS, Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, dan Agenda Habituasi. Sedangkan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas terdiri dari 2 (dua), yaitu Kompetensi teknis administratif dan Kompetensi teknis substantif.

Gambar 12. Kegiatan Pembelajaran *Distance Learning* dan Klasikal Latsar CPNS Golongan III

Metode pembelajaran yang digunakan dalam Pelatihan Dasar CPNS Golongan III ini adalah ceramah yang dikombinasi dengan tanya jawab, diskusi kelompok, permainan, pendalaman materi, dan seminar. Pada tahun 2021 Pusdiklat BPS melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III sebanyak 12

angkatan yaitu Angkatan 60 s.d. 71 dengan peserta sebanyak 427 orang yang merupakan lulusan dari Politeknik STIS tahun 2020.

Sekitar bulan Juni hingga September terjadi lonjakan kenaikan kasus Covid-19 yang cukup signifikan, sehingga dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dan diberlakukan mekanisme kerja *Work From Home* (WFH). Oleh karena itu, kegiatan Latsar CPNS Golongan III Angkatan ke-60 sampai dengan 67 yang seyogyanya tahap akhir dilakukan dengan pola pembelajaran klasikal atau tatap muka langsung dirubah menjadi pola pembelajaran *online*. Sedangkan untuk Latsar CPNS Golongan III Angkatan ke-68 sampai dengan 71, kegiatan pembelajaran klasikal tetap bisa dilakukan dengan memberlakukan prosedur kesehatan yang ketat dan izin dari Satgas Covid-19 setempat.

Gambar 13. Kegiatan Seminar Rancangan dan Evaluasi Aktualisasi Latsar CPNS Golongan III

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan Latsar CPNS, baik Golongan II maupun Golongan III, yaitu terdapat 1 (satu) orang peserta Latsar CPNS Golongan III Angkatan ke-71 yang sakit dan harus menjalani pengobatan secara intensif sehingga tidak dapat melanjutkan kegiatan Latsar. Calon peserta

tersebut dikembalikan ke Biro SDM untuk penanganan administrasi kepegawaian lebih lanjut. Selain itu, terdapat peserta Latsar CPNS Golongan II Angkatan ke-7 yang sakit dan harus menjalani pengobatan sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan pelatihan sesuai jadwal. Namun, yang bersangkutan berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dan memperoleh hasil yang optimal. Kendala teknis lain yang dialami selama pelatihan adalah dalam penerbitan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP). Terjadi *erorr* dalam sistem aplikasi *smartbangkom* sehingga penerbitan STTP harus mengalami beberapa pengulangan tahapan. Namun, dengan kerja sama yang baik antara pihak Pusdiklat BPS dan LAN RI, maka masalah yang terjadi terkait dengan penerbitan STTP dapat diatasi. Selain itu, dengan adanya *distance learning* sebagai bagian dari *blended learning*, jaringan internet dan listrik di daerah juga menjadi suatu kendala. Seperti halnya pada saat pembelajaaran, ada peserta yang tidak bisa *full* mengikuti pembelajaran karena jaringan internet terputus. Salah satu solusinya, peserta yang memang berasal dari wilayah yang jaringan internetnya sulit, memilih pindah lokasi kerja/belajar ke kota provinsi atau kabupaten terdekat yang memiliki jaringan internet bagus.

1.2. Pelatihan Kepemimpinan

Untuk membentuk sosok PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral, bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, perlu pembinaan melalui jalur diklat yang mengarah ke peningkatan sikap dan semangat pengabdian, kompetensi teknis, manajerial dan atau kepemimpinan serta efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas. Disamping itu juga diharapkan berwawasan global dan nasional, mampu menjabarkan arah, strategi kebijakan dan program instansi kedalam kegiatan serta mampu mensinergikan seluruh stakeholder stratejik. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang diperlukan dalam pembentukan kompetensi PNS untuk jabatan struktural eselon IV adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tingkat IV) dan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III. Pada tahun 2021, Pusdiklat BPS menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat IV dan tingkat III.

Tabel 11. Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan yang Dilaksanakan Tahun 2021

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta		Capaian
		Target	Realisasi	
1.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan ke-5	40	39	Tidak tercapai
2.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan ke-6	40	39	Tidak tercapai
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan ke-7	40	40	Tercapai
4.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan ke-8	40	39	Tidak tercapai
5.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan ke-2	40	40	Tercapai
	Total	**200**	**197**	**Tidak tercapai**

Pada tahun 2021, Pusdiklat BPS menyelenggarakan PKP sebanyak 4 (empat) Angkatan dan 1 (satu) Angkatan PKA, dengan target peserta sebanyak 200 peserta. Akan tetapi, di tengah pelaksanaan kegiatan PKP terdapat masing-masing 1 (satu) orang peserta dari PKP Angkatan ke-5, 6, dan 8 yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan sehingga tidak bisa melanjutkan pelatihan. Sehingga realisasi jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pada tahun 2021 sebanyak 197 orang.

Tabel 12. Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Kepemimpinan yang Lulus Memuaskan Tahun 2021

No.	Nama Pelatihan	Persentase Lulus Memuaskan		Capaian
		Target	Realisasi	
1.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan ke-5	95	100	Tercapai

No.	Nama Pelatihan	Persentase Lulus Memuaskan		Capaian
		Target	Realisasi	
2.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan ke-6	95	100	Tercapai
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan ke-7	95	100	Tercapai
4.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan ke-8	95	97.44	Tercapai
5.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan ke-2	95	100	Tercapai
	Rata-rata	**95**	**99.49**	**Tercapai**

Pada tahun 2021 capaian persentase kelulusan peserta pelatihan kepemimpinan dengan kategori memuaskan adalah sebesar 99.49, lebih besar dari target 95 persen sehingga target persentase kelulusan peserta pelatihan kepemimpinan yang lulus dengan kategori minimal memuaskan adalah tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 13 yang menunjukkan bahwa hampir semua peserta memperoleh predikat kelulusan dengan kategori minimal memuaskan.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (Per LAN) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Kepka LAN) Nomor 1005/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, maka sejak Tahun 2020 Diklatpim Tingkat IV berubah nomenklatur menjadi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Sedangkan berdasar pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara (Per LAN) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Kepka LAN) Nomor 1007/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, maka sejak Tahun 2020 Diklatpim Tingkat III berubah nomenklatur menjadi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).

1.2.1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) bertujuan membentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan pada pejabat pengawas yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing. Melalui PKP diharapkan setiap peserta pelatihan memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan publik pada sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, melalui pelatihan ini diharapkan terwujudnya kesamaan visi dan misi, serta dapat melaksanakan dan meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam yarakat.

Gambar 14. Kegiatan Pembelajaran *Distance Learning* PKP

Proses kegiatan pelatihan dilakukan dengan pendekatan proses belajar orang dewasa (andragogi). Berdasarkan pendekatan ini maka metode yang digunakan adalah ceramah/kuliah, diskusi, seminar, praktek, simulasi, studi kasus, dan studi lapangan. PKP terbagi dalam 4 agenda pembelajaran, yaitu Agenda Kepemimpinan Pancasila (Agenda 1), Agenda Kepemimpinan Pelayanan (Agenda 2), Agenda Pengendalian Pekerjaan (Agenda 3), dan Agenda Aktualisasi Kepemimpinan (Agenda 4). Untuk Agenda 1 sampai dengan 4 dilakukan secara klasikal (*on compus*) dengan jumlah JP sebanyak 290 JP atau 36 hari pelatihan.

Sedangkan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan di tempat kerja atau nonklasikal (*off campus*) dengan jumlah JP sebanyak 540 JP atau 60 hari hari kerja.

Maksud dan tujuan dari PKP adalah diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan dan membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada jenjang Eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di unit kerjanya masing-masing.

Gambar 15. Kegiatan Studi Lapangan PKP

Pada tahun anggaran 2021, BPS bekerja sama dengan LAN RI telah melaksanakan PKP sebanyak 4 (empat) angkatan yaitu Angkatan ke-5 sampai dengan Angkatan ke-8 dengan total jumlah peserta sebanyak 157 orang pada bulan Januari sampai Juli. Dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, maka pelaksanaan pelatihan tidak bisa dilaksanakan secara klasikal secara keseluruhan, yaitu dengan pola pembelajaran *blended learning*.

Gambar 16. Kegiatan Seminar Rancangan dan Evaluasi Aksi Perubahan PKP

Untuk PKP Angkatan ke-5 dan 6, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara *blended learning*. Pembelajaran mata pelatihan, studi lapangan, dan seminar rancangan aksi perubahan dilaksanakan secara virtual, sedangkan untuk seminar evaluasi implementasi aksi perubahan dilaksanakan secara klasikal atau tatap muka langsung di Pusdiklat BPS dengan memberlakukan prosedur kesehatan ketat dan izin Satgas Covid-19 setempat. Sedangkan untuk PKP Angkatan ke-7 dan 8, pembelajaran dilaksanakan secara *distance learning* karena pada bulan Juni hingga September terjadi lonjakan kenaikan jumlah penderita Covid-19 sehingga pemerintah Kembali melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dan adanya kebijakan mekanisme kerja *Work From Home* (WFH). Akan tetapi, walaupun terjadi perubahan pola pembelajaran, semua kegiatan bisa dilaksanakan sesuai jadwal.

Gambar 17. Kegiatan Berbagi Pengalaman Memimpin Aksi Perubahan PKP

Pada saat pelaksanaan pelatihan, terdapat peserta yang mengundurkan diri dari status kepesertaan pelatihan, diantaranya adalah peserta PKP Angkatan

ke-5 sebanyak 1 (satu) orang peserta, peserta PKP Angkatan ke-6 sebanyak 1 (satu) orang peserta, dan peserta PKP Angkatan ke-8 sebanyak 1 (satu) orang peserta. Peserta PKP Angkatan ke-5 dan 6 mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan harus menjalani pengobatan intensif. Sedangkan peserta PKP Angkatan ke-8 mengundurkan diri karena alasan keluarga yang harus diselesaikan.

1.2.2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)

Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) bertujuan meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat administrator yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing. Melalui pelatihan kepemimpinan diharapkan setiap peserta pelatihan memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan publik pada sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, melalui pelatihan ini diharapkan terwujudnya kesamaan visi dan misi, serta dapat melaksanakan dan meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat.

Proses kegiatan pelatihan dilakukan dengan pendekatan proses belajar orang dewasa (andragogi). Berdasarkan pendekatan ini maka metode yang digunakan adalah ceramah/kuliah, diskusi, seminar, praktek, simulasi, studi kasus dan observasi lapangan. Seperti halnya pada PKP, PKA juga terbagi dalam 4 agenda pembelajaran, yaitu Agenda Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme (Agenda 1), Agenda Kepemimpinan Kinerja (Agenda 2), Agenda Manajemen Kinerja (Agenda 3), dan Agenda Aktualisasi Kepemimpinan (Agenda 4). Untuk Agenda 1 sampai dengan 4 dilakukan secara klasikal (on campus) dengan jumlah JP sebanyak 257 JP atau 31 hari pelatihan. Sedangkan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan di tempat kerja atau nonklasikal (off campus) dengan jumlah JP sebanyak 540 JP atau 60 hari hari kerja.

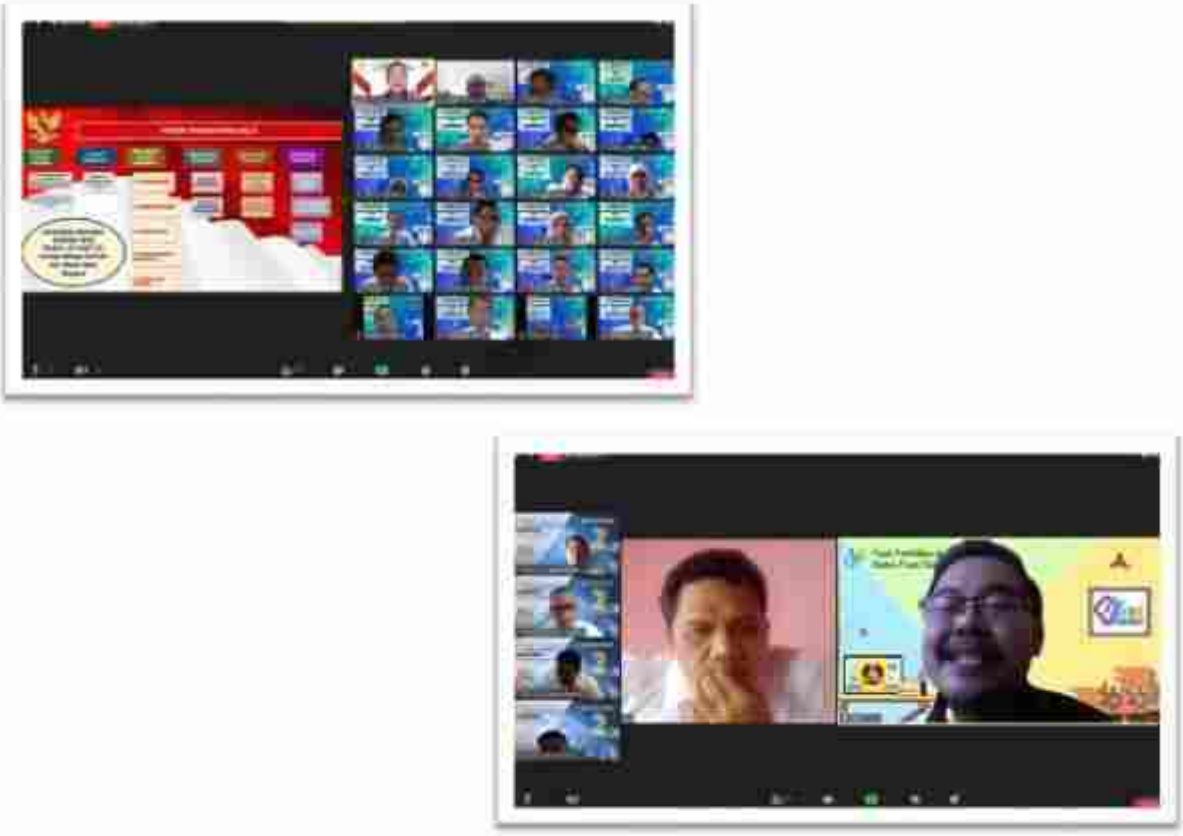

Gambar 18. Kegiatan Pembelajaran *Distance Learning* PKA

Maksud dan tujuan dari kegiatan PKA adalah untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang signifikan. Kemampuan memimpin perubahan inilah yang kemudian menentukan keberhasilan peserta tersebut dalam memperoleh kompetensi yang ingin dibangun dalam penyelenggaraan PKA. Dengan demikian, PKA ini diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan.

Gambar 19. Kegiatan Studi Lapangan PKA

Pada Tahun 2021 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, maka pelaksanaan pelatihan yang biasannya dilaksanakan secara klasikal berubah metode menjadi pola pembelajaran *blended learning*. Kegiatan pembelajaran mata pelatihan, studi lapangan, dan seminar rancangan aksi perubahan dilakukan secara virtual. Sedangkan seminar evaluasi implementasi akasi perubahan dilakukan secara klasikal atau tatap muka langsung di Makassar, Sulawesi Selatan dengan memberlakukan prosedur kesehatan ketat dan izin Satgas Covid-19 setempat.

Gambar 20. Kegiatan Seminar Rancangan dan Evaluasi Aksi Perubahan PKA

Pada tahun 2021 hanya dilaksanakan 1 (satu) kelas PKA dengan jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang yang berasal dari unit kerja BPS di Kabupaten/Kota. Mereka adalah para pejabat administrator yang telah bertugas dan/atau dilantik sebagai Kepala BPS Kabupaten/Kota. Output dari kegiatan PKA Angkatan ke-2 adalah Alumni Peserta Pelatihan yang berjumlah 40 orang.

Gambar 21. Rangkaian Kegiatan Penutupan PKA

1.2.3. Diklatpim Tingkat I dan II (Pelatihan Kepemimpinan Nasional, PKN Tk. I dan II)

Dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II seperti ini, peserta dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang perubahan di unit kerjanya, memimpin perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang signifikan. Kemampuan memimpin perubahan ini kemudian menentukan keberhasilan peserta tersebut dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II. Dengan demikian, pembaharuan Diklatpim Tingkat II ini diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan. Selain itu, tujuan lainnya adalah meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural Eselon II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2020, telah dikirimkan pejabat struktural Eselon II untuk mengikuti PKN Tingkat II di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI sebanyak 8 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 5 orang mengikuti di LAN RI DKI Jakarta, 2 orang di LAN RI Jawa Tengah, dan 1 orang di LAN RI Jawa Timur. Selain itu untuk PKN Tingkat I juga diikuti sebanyak 2 orang di LAN RI DKI Jakarta. Kegiatan PKN I dan II diikuti secara blended yaitu pembelajaran secara online dan seminar melalui tatap muka. Output dari PKN tersebut adalah Alumni Peserta Diklat.

1.3. Evaluasi Pasca Diklat (EPD)

Pengembangan sumberdaya manusia (human resources development/HRD) merupakan bagian dari proses bisnis sebuah organisasi. Bagi organisasi publik, untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang tinggi, diperlukan peningkatan mutu dan pengembangan wawasan pegawainya. Upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah dalam peningkatan mutu profesionalisme dan pengembangan

wawasan Pegawai Negeri Sipil adalah melalui program Pelatihan dan Pelatihan (Diklat).

Diklat merupakan sebuah proses untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi sebagai nilai balikan investasi (return on investment) dari program pengembangan pegawai. Sejalan dengan tujuan tersebut, BPS melalui Pusdiklat berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas Diklat setiap tahunnya. Diharapkan dengan Diklat tersebut ada peningkatan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis maupun manajerial.

EPD merupakan alat untuk mendiagnosis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan diklat. Dengan EPD, keberhasilan dan kekurangan diklat dapat dianalisis lebih lanjut. Hasil EPD akan menjadi masukan (feedback) yang sangat penting dalam memperbaiki kualitas diklat dan menjaga keberlanjutan organisasi penyelenggara diklat. EPD menjadi alat ukur serta merupakan proses evaluasi diklat yang komprehensif untuk menangkap adanya kontribusi pengembangan SDM. Hasilnya akan memberikan data penting kepada semua pemangku kepentingan yang dapat dijadikan alat komunikasi bagi pengembangan SDM kepada organisasi.

Selain itu, mengacu pada pedoman penyelenggaraan Diklat, EPD merupakan rangkaian dari penyelenggaraan diklat (Per LAN Nomor 1 Tahun 2021 untuk Pelatihan Dasar CPNS, Per LAN Nomor 15 Tahun 2019 untuk PKP, dan Per LAN Nomor 16 Tahun 2019 untuk PKA). EPD merupakan mata rantai dari siklus penyelenggaraan diklat yang harus dilakukan. Oleh karena itu, Pusdiklat BPS pada tahun 2021 melakukan EPD untuk pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat di masa yang akan datang, melalui pengembangan/penyempurnaan tata cara penyelenggaraan yang benar-benar mengacu kepada kompetensi spesifik sesuai kebutuhan pengguna hasil diklat. Evaluasi Pasca Diklat (EPD) tahun 2021 ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja alumni Latsar CPNS, PKP, dan PKA Tahun 2020. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan EPD adalah survei

daring bagi semua alumni pelatihan dan wawancara mendalam (indepth interview) secara sampling.

Gambar 22. Kegiatan Indepth Interview terhadap Responden EPD

Kegiatan EPD ini meliputi survei daring untuk seluruh alumni diklat dan unit kerjanya dan survei wawancara mendalam (indepth interview) terhadap sampel alumni. Respondennya adalah alumni, atasan alumni, bawahan (bagi yang mempunyai jabatan struktural) dan rekan kerja alumni yang selevel. Sedangkan yang dimaksud dengan alumni adalah pegawai yang telah menyelesaikan PKA, PKP, dan Latsar CPNS pada Tahun 2020.

Hasil dari kegiatan EPD menunjukkan bahwa tingkat kinerja alumni pelatihan kepemimpinan baik PKA maupun PKP dan Latsar CPNS secara umum memuaskan. Implementasi proyek perubahan alumni PKP dan PKA dalam jangka menengah dan panjang sudah cukup baik, mulai banyak proyek perubahan yang dilakukan alumni peserta pelatihan kepemimpinan menjadi salah satu bagian

inovasi di unit kerjanya. Sedangkan kesinambungan aktualisasi substansi alumni Latsar CPNS berjalan dengan baik serta bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di unit kerja. Rekomendasi yang penting dilakukan dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan adalah melakukan monitoring secara berkala terhadap implementasi proyek perubahan jangka menengah dan panjang serta perlunya variasi bentuk inovasi dalam proyek perubahan dimana selama ini didominasi oleh bentuk aplikasi program komputer. Sedangkan untuk penyelenggaraan Latsar CPNS diantaranya peningkatan disiplin peserta tidak hanya saat pelatihan namun sampai kembali di unit kerja serta penerapan nilai-nilai dasar ANEKA.

2. Fungsi Diklat Teknis dan Fungsional

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Badan Pusat Statistik adalah melalui pendidikan dan pelatihan di bidang teknis. Oleh karena itu, peran Pusdiklat BPS bersama unit kerja teknis terkait sangat dibutuhkan dalam merancang jenis diklat teknis substansi yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis.

Pusdiklat BPS menyelenggarakan juga Diklat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat fungsional baik untuk pegawai BPS ataupun untuk pegawai Kementerian/Lembaga lain.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan diklat yang terdiri dari Diklat Fungsional sebanyak 2 (dua) diklat dengan total 2 (dua) kelas, Diklat Teknis sebanyak 5 (lima) diklat dengan total 8 (delapan) kelas, Diklat Statistik Sektoral sebanyak 4 (empat) diklat dengan total 42 (empat puluh dua) kelas, Refreshing dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 6 (enam) diklat dengan total 6 (enam) kelas. Total Peserta yang dilatih adalah sebanyak 2.985 orang. Penjelasan laporan kegiatan diklat selengkapnya adalah sebagai berikut :

2.1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif

2.1.1. Pelatihan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Pranata Komputer

Pada Tahun 2021 Pusdiklat BPS menyelenggarakan Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk fungsional Pranata Komputer. Pelatihan ini bermaksud untuk meningkatkan pemahaman Pegawai BPS dalam melakukan penyusunan KTI sesuai dengan teknik-teknik yang tepat dan baik serta dapat menghindari praktek-praktek plagiarisme. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2021.

Adapun pelaksanaan Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Pranata Komputer pada tanggal 29 Maret – 9 April 2021, Bimbingan Penulisan KTI pada tanggal 12 April – 31 Mei 2021 dan pelaksanaan Seminar pada tanggal 16 – 18 Juni 2021. Seluruh kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan metode pembelajaran jauh jarak (tatap muka online). Jumlah peserta Pelatihan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebanyak 40 orang peserta yang terdiri dari 29 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Peserta pelatihan berasal dari 36 orang dari BPS Daerah dan 4 orang dari BPS Pusat.

Pengajar dalam pelatihan ini adalah Dosen Universitas Gajah Mada, Widyaiswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Widyaiswara Pusdiklat BPS dan Fungsional Pranata Komputer dari BPS Pusat.

Evaluasi dilakukan melalui teknik observasi selama pembelajaran berlangsung, angket serta melalui Seminar hasil penulisan karya tulis ilmiah. Hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan merupakan indikaator kinerja Pusdiklat yang menyatakan kepuasan peserta selama mengikuti pelatihan senilai 90.49 persen.

Peserta Pelatihan Penulisan KTI Tahun 2021 diharuskan mengirimkan naskah KTI ke jurnal ilmiah. Dari 40 peserta, seluruh peserta berhasil menampilkan karya tulisnya hingga mengikuti seminar. Sehingga seluruh peserta yang dinyatakan LULUS berhak mendapatkan sertifikat pelatihan. Keluaran (output)

dari penyelenggaraan pelatihan berupa alumni peserta pelatihan dan Karya Tulis Ilmiah yang sudah diseminarkan dan dikirimkan ke Jurnal.

Gambar 23. Kegiatan belajar dengan Fasilitator Ibu Sri Rum Giyarsih dari Universitas Gajah Mada

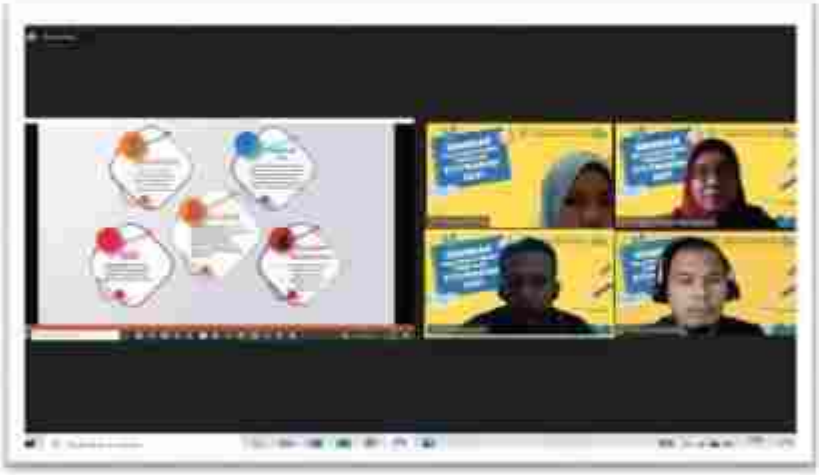

Gambar 24. Kegiatan Seminar Pelatihan Teknis KTI Prakom

2.1.2. Pelatihan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Statistisi

Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk Fungsional Statistisi Angkatan I dilaksanakan mulai tanggal 19 April sampai dengan 23 Juni 2021 menggunakan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) memanfaatkan LMS Warung Kompetensi Pusdiklat BPS. Jumlah peserta Pelatihan sebanyak 40 orang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 23 orang perempuan. Sebanyak 38 peserta pelatihan berasal dari BPS Daerah dan 12 peserta berasal dari BPS Pusat.

Pengajar dalam Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk Fungsional Statistisi Angkatan I adalah widyaiswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Dosen dari Universitas Gajahmada, Pusdiklat BPS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan BPS. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN Pusdiklat BPS tahun anggaran 2021.

Selanjutnya, karena banyaknya peminat, Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk Fungsional Statistisi Angkatan II dilaksanakan mulai tanggal 12 Juli sampai dengan 14 September 2021 dengan metode e-learning. Peserta Pelatihan sebanyak 45 (empat puluh lima) orang peserta yang terdiri 20 (dua puluh) orang laki-laki dan 25 (dupuluh lima) orang perempuan. Sebanyak 39 peserta pelatihan berasal dari BPS Daerah, 5 peserta berasal dari BPS Pusat dan 1 orang dari Pusdiklat.

Fasilitator dalam Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk Fungsional Statistisi Angkatan II adalah widyaiswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Dosen dari Universitas Hasanudin, Pusdiklat BPS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan BPS. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN Pusdiklat BPS tahun anggaran 2021.

Evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang diberikan oleh peserta merupakan indikator kinerja Pusdiklat BPS yang mengindikasikan kepuasan peserta selama mengikuti pelatihan, penilaian untuk Angkatan I sebesar 92,90 persen dan Angkatan II sebesar 92,91 persen. Peserta Pelatihan teknis Penulisan KTI Fungsional Statistisi Tahun 2021 yang telah mengirimkan naskah ilmiahnya ke jurnal ilmiah sebanyak 100 persen. Keluaran (output) dari pelatihan ini berupa banyaknya peserta pelatihan KTI yang sudah mengikuti seminar dan mengirimkan papernya ke Jurnal ilmiah.

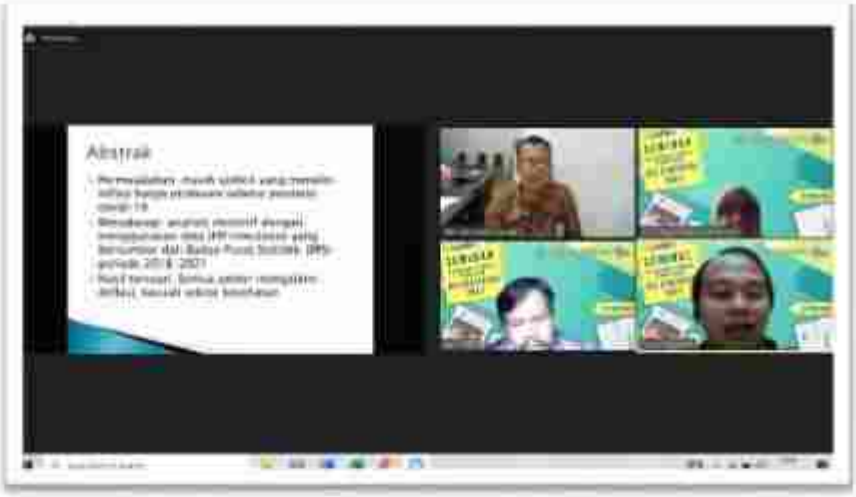

Gambar 25. Kegiatan Seminar Pelatihan Penulisan KTI STatistisi

2.1.3. Pelatihan Statistik Sektoral Kab/Kota

Sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS berkewajiban memberikan pembinaan kepada kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral. Data statistik sektoral yang dihasilkan sangat diperlukan untuk perencanaan, monitoring, maupun evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga data tersebut harus akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah, sesuai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019.

Cita-cita dalam Perpres tersebut dapat terwujud, jika seluruh instansi terkait khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) pada level Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan statistik sektoral sehingga memiliki kemandirian dalam penyediaan ragam statistik yang diperlukan. Dalam rangka mendukung tujuan ini, maka BPS melalui Pusdiklat BPS akan menyelenggarakan Pelatihan Statistik Sektoral kepada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2021.

Tujuan dari diadakannya pelatihan Statistik Sektoral adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam kegiatan statistik sehingga memiliki kemandirian

dalam penyediaan ragam statistik yang dibutuhkan. Pelatihan Statistik Sektoral diselenggarakan secara virtual, mulai tanggal 30 Agustus sd 15 Oktober 2021, dibagi menjadi 7 (tujuh) angkatan, dimana masing-masing angkatan terdiri dari 4 (empat) kelas (A, B, C dan D).

Gambar 26. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Statistik Sektoral

Sebagai follow-up dari pelatihan secara virtual, peserta akan ditugaskan untuk menyusun working paper berupa Rancangan Kegiatan Statistik (RKS). Tugas ini dikerjakan secara kelompok daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) dengan sistem coaching oleh para pengajar. Selanjutnya RKS ini akan dipaparkan dalam kegiatan Seminar RKS.

Peserta berasal dari BPS, Diskominfo, Bappeda/OPD dari 34 Provinsi dan 417 Kabupaten/ Kota, dimana setiap instansi diwakili oleh satu peserta. Dengan demikian jumlah sebanyak 1.319 yang didistribusi dalam 7 (tujuh) angkatan. Adapun pengajar pelatihan merupakan para fungsional statistisi, pranata Komputer, widyaiswara, dan fungsional lainnya yang berasal dari Pusdiklat dan tim SDI BPS.

Gambar 27. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Statistik Sektoral melalui Zoom Meeting

2.1.4. Asean Help Asean (AHA) Training

Sebagai bagian dari implementasi kerangka kerja *ASEAN HELP ASEAN* (AHA), BPS memiliki peran sebagai narasumber untuk negara-negara ASEAN dalam bidang neraca, *big data* dan harga produksi. Kegiatan AHA diselenggarakan berdasarkan kesepakatan pada pertemuan sidang tahunan ASEAN *Community on Statistical System* (ACSS), dimana salah satu aktivitasnya adalah meminimalisasi gap (*narrowing gap inisiative*) dalam penyediaan data PDB ASEAN tahunan dan triwulanan sesuai klasifikasi standar yang disepakati.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan komunikasi intens dalam diskusi tahunan *Working Group* SNA (WGSNA) maupun pandangan *experts*, disepakati untuk memberikan dukungan kepada LAO dan Myanmar, karena kedua negara tersebut baru menghasilkan data PDB tahunan menurut lapangan usaha. Dari penyelenggaraan ini diharapkan LAO dan Myanmar dapat mengadopsi SNA terbaru, merilis PDB lapangan usaha, serta pengeluaran tahunan maupun triwulanan, secara kontinuitas program percepatan rilis PDB tahunan dan triwulanan, dan meningkatkan kualitas data PDB yang dihasilkan.

Penyelenggara kegiatan ini adalah Pusdiklat BPS, dilaksanakan secara *halfday meeting by zoom* dari tanggal 21 s.d 25 Juni 2021. Pengajar utama adalah Michael Davies (*expert ASEAN-Stats*) dibantu perwakilan dari BPS. Peserta kegiatan ini sebanyak 12 orang, berasal dari LAO (2 peserta) dan Myanmar 10 (sepuluh) peserta.

Tim kerja kegiatan AHA merupakan kolaborasi antara ASEAN-Stats dan BPS. Perwakilan BPS terdiri dari Biro Humas, Pusdiklat BPS, Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran. Narasumber BPS berasal dari Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, Direktorat Statistik Harga, Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran.

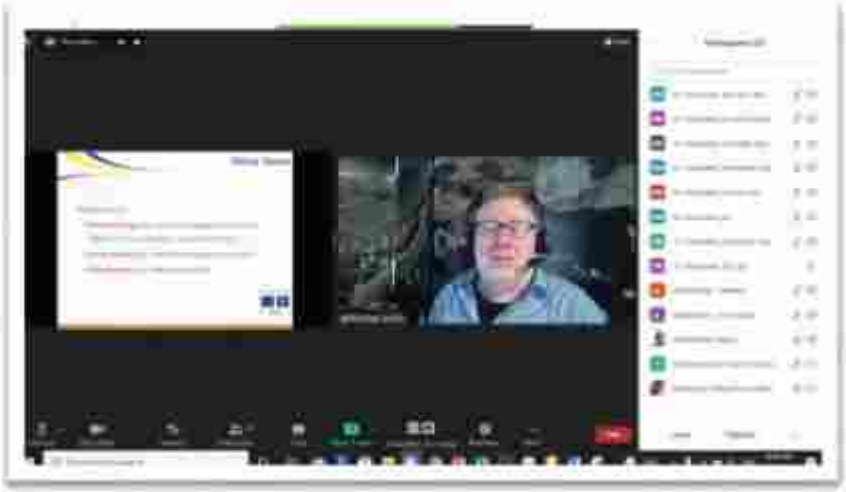

Gambar 28. Pembelajaran melalui Zoom Meeting *AHA Training*

2.1.5. Pelatihan Pembina 100 Desa Cantik Tahap I

Pada Tahun 2021 Pusdiklat BPS menyelenggarakan Pelatihan Pembina 100 Desa Cantik Tahap I untuk para calon pembina Desa Cinta Statistik (Cantik) di 100 desa terpilih sesuai *Quick Wins* BPS 2021. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para calon pembina dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak aparat, komunitas, atau pihak-pihak terkait lainnya di desa/kelurahan. Oleh karena itu, Pusdiklat memandang pentingnya penyediaan materi Teknik Komunikasi dan *Public Speaking*.

Pelatihan ini dilaksanakan secara *online* dengan metode *e-learning* yang terdiri dari 2 angkatan, masing-masing 2 kelas (atau total 4 kelas). Pembelajaran dilaksanakan selama 5 hari. Angkatan I pada tanggal 26 sd 30 April dan Angkatan II tanggal 3 sd 7 Mei 2021. Jumlah peserta sebanyak 200 (dua ratus) orang (masing-masing kelas 50 orang), yang berasal dari 30 provinsi, tepatnya dari 100 desa

terpilih. Pengajar dalam pelatihan ini adalah Pakar Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Jurnalis, dan Tim Saga, Kegiatan ini dibiayai dari APBN Pusdiklat BPS tahun anggaran 2021.

Setelah mengikuti materi pembelajaran ini, para calon Pembina Desa Cantik diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan teknik-teknik komunikasi dan koordinasi, baik secara konseptual maupun *best practices* dalam rangka melakukan komunikasi dan koordinasi dengan aparat, komunitas, maupun pihak-pihak terkait dalam program Desa Cantik di Badan Pusat Statistik.

Gambar 29. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Pembina 100 Desa Cantik Tahap I

2.1.6. Pelatihan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis

Pelatihan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta dalam mengelola arsip dinamis, yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Ruang lingkup materi pelatihan meliputi kegiatan penciptaan arsip, penggunaan, dan pemeliharaan.

Sistem pembelajaran pelatihan ini yaitu dengan metode pembelajaran jarak jauh, selama 4 hari kerja atau 35 Jam Pelajaran (JP). Pelatihan dilaksanakan tanggal 7 s.d 10 Juni 2021. Pengajar/fasilitator pada pelatihan ini adalah Pejabat Struktural dan Widyaiswara dari Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Peserta seluruhnya berjumlah 30 orang yang berasal dari 10 orang BPS Pusat (Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Humas dan Hukum), 1 orang Pusdiklat BPS dan 19 orang BPS Provinsi. Peserta yang sudah menduduki jabatan fungsional Arsiparis sebanyak 27 orang dan 3 orang masih merupakan Calon Arsiparis.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan teknis pengelolaan arsip dinamis yang mendapatkan STTPP. Dari 30 peserta yang mengikuti pelatihan, seluruhnya dinyatakan lulus pelatihan dan berhak mendapatkan STTPP.

Gambar 30. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis

2.1.7. Pelatihan Pembina Desa Cantik Tambahan

Selain pelatihan terhadap pembina 100 Desa Cantik sesuai program *Quick Wins* BPS 2021, Pusdiklat BPS juga melaksanakan pelatihan terhadap pembina desa cantik lainnya (tambahan sebanyak 177 desa). Pola pembelajaran pelatihan sama dengan pelatihan pembina 100 desa cantik sebelumnya, karena memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kemampuan para calon pembina dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak aparat, komunitas, atau pihak-pihak terkait lainnya di desa/kelurahan.

Pelatihan ini dilaksanakan secara *online* dengan metode *e-learning*, terdiri dari 2 angkatan (Angkatan III dan IV) dengan masing-masing 3 kelas (total 6 kelas). Pembelajaran dilaksanakan selama 5 hari. Angkatan III dilaksanakan tanggal 28

Juni sd 2 Juli 2021 dan Angkatan II tanggal 5 sd 9 Juli 2021. Jumlah peserta pelatihan ini sebanyak 354 orang, berasal dari 34 provinsi. Pengajar merupakan para Pakar Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Jurnalis, dan Tim Saga. Kegiatan ini dibiayai dari APBN Pusdiklat BPS Tahun Anggaran 2021.

Setelah mengikuti materi pembelajaran ini, para calon Pembina Desa Cantik mampu memahami dan mengimplementasi teknik-teknik komunikasi dan koordinasi, baik secara konseptual maupun *best practices* dalam rangka melakukan komunikasi dan koordinasi dengan aparat, komunitas, maupun pihak-pihak terkait dalam program Desa Cantik di BPS.

Gambar 31. Kegiatan Pelatihan Pembina Desa Cantik Tambahan

2.1.8. Pelatihan Pembina 100 Desa Cantik Tahap II

Pelatihan Pembina 100 Desa Cantik Tahap II merupakan rangkaian kegiatan lanjutan setelah Pelatihan Pembina 100 Desa Cantik Tahap I, dengan target peserta yang sama yaitu para pembina Desa Cantik di 100 desa terpilih. Pelatihan ini diselenggarakan setelah para pembina Desa Cantik menggali informasi kebutuhan desa terkait bidang statistik.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi para pembina Desa Cantik mengenai tahapan Proses Bisnis Kegiatan Statistik(GSBPM, Generic Statistical Business Process Model) dan Ilmu-ilmu dasar statistik yang relevan dengan kebutuhan desa. Kegiatan ini dibiayai dari APBN BPS tahun anggaran 2021.

Pelatihan Pembina 100 Desa Cantik Tahap II ini dilaksanakan secara *on-line* dengan metode *blended learning* yang terdiri dari 2 angkatan, masing-masing 2 kelas. Pembelajaran dilaksanakan selama 5 hari. Angkatan I pada tanggal 26 sd 30 Juli dan Angkatan II tanggal 2 sd 6 Agustus 2021, dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang peserta (masing-masing kelas 50 orang), yang berasal dari 30 provinsi. Para pengajar dalam pelatihan ini adalah Fungsional Widyaiswara, Fungsional Statistisi, Pejabat Struktural, dan Para Fasilitator yang ahli di bidangnya.

Untuk mengetahui capaian para peserta, telah dilakukan wvaluasi terhadap seluruh peserta diklat, yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur-unsur penilaian sesuai persyaratan nilai yang ditentukan dalam aturan pedoman penyelenggaraan diklat. Rata-rata nilai ujian seluruh peserta diklat sebesar 89,50 dengan nilai tertinggi 95,00 dan terendah 82,20. Seluruh peserta dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan.

Gambar 32. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Pembina 100 Desa Cantik Tahap II

Gambar 33. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Pembina 100 Desa Cantik Tahap II

2.1.9. Short Course Pranata Komputer

Badan Pusat Statistik (BPS) selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK) berkewajiban memberikan pembinaan serta penyelenggaraan pelatihan fungsional Pranata Komputer. Pembinaan ini tidak saja untuk pegawai BPS, tetapi juga pegawai dari kementrian/lembaga lain.

Short Course Pranata Komputer merupakan program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi di bidang teknis aparatur pemerintah pejabat dan calon pejabat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli. Diharapkan nantinya pejabat Fungsional Pranata Komputer ini memiliki kemampuan memahami sistem penilaian dan administrasi pranata komputer, memahami jenis dan macam butir kegiatan pranata computer, dan menyusun dokumentasi dan pelaporan kegiatan pranata komputer secara baik. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah metode e-learning yaitu belajar mandiri, tatap muka online, tanya jawab, diskusi, dan latihan.

Maksud dan tujuan pelatihan tersebut sebagai bentuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPS sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer; melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pusdiklat sebagai penyelenggara pelatihan teknis dan fungsional selain itu; juga bertujuan untuk membentuk standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh pejabat fungsional pranata komputer. Sasaran pelatihan adalah PNS BPS, Kementerian/Lembaga/ Pemda/Universitas/Dinas yang sudah menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli namun belum pernah mengikuti pelatihan terkait fungsional pranata komputer. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2021.

Adapun pelaksanaan *Short-Course* diselenggarakan pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 9 dan 10 November 2021, yang dilaksanakan menggunakan metode e-learning pada *Learning Management System* (LMS) Warkop Pusdiklat BPS. Jumlah peserta *Short Course* Fungsional PRAKOM Kelas A sebanyak 108 orang, Kelas B sebanyak 59 orang, dan Kelas C sebanyak 75 orang. Pengajar dalam pelatihan ini adalah para Pejabat struktural dan fungsional Pusdiklat BPS dan BPS

Pusat yang berkompeten di bidang Teknologi Informasi dan bidang Jabatan Fungsional.

Output dari penyelenggaraan *Short Course* Pranata Komputer adalah peserta pelatihan yang lulus. Pada tahun 2021, pelaksanaan short course ini diikuti oleh 242 peserta, dimana semua peserta mengikuti kegiatan sampai akhir jadwal, dan semua peserta lulus dan mendapatkan sertifikat. Evaluasi dilakukan terhadap peserta dan penyelenggara, dimana penilaian terhadap peserta mencakup penyerapan seluruh materi perlatihan, sementara itu peserta memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan pelatihan. Adapun hasil evaluasi penyelenggaraan untuk Kelas A sebesar 88,52, Kelas B sebesar 90,09 dan Kelas C sebesar 88,05 secara rata-rata sebesar 88,89 persen.

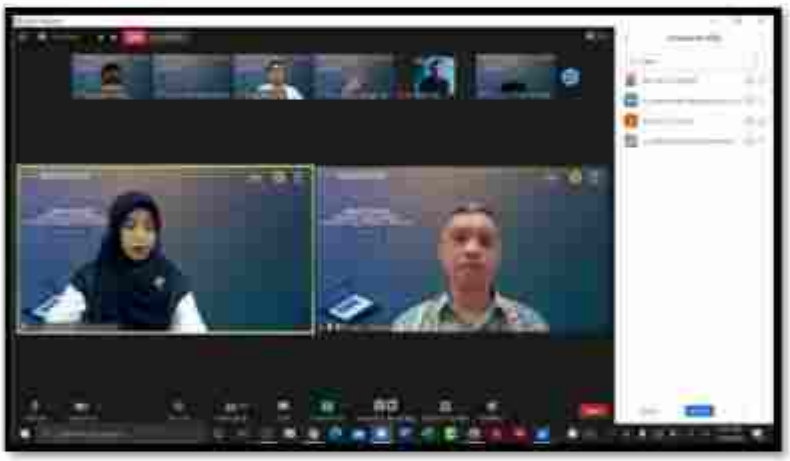

Gambar 34. Kegiatan Pembukaan *Short Course* Pranata Komputer

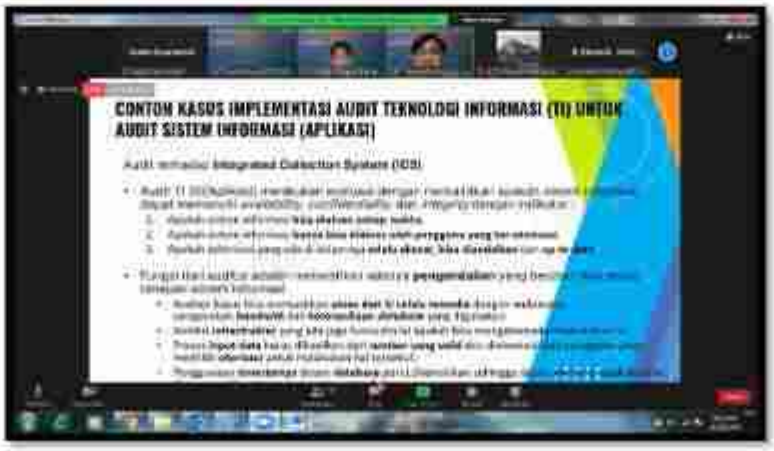

Gambar 35. Kegiatan Pembelajaran melalui Zoom Meeting *Short Course* Prakom

2.2. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

2.2.1. Pelatihan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli

Pusdiklat BPS bekerjasama dengan Pusdiklat ANRI pada tahun 2021 menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli. Pelatihan ini bertujuan antara lain untuk memberikan bekal bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kearsipan, pemahaman tentang penyelenggaraan kearsipan serta pemahaman tentang jabatan fungsional arsiparis dan angkatan kreditnya. Pelatihan dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh sebanyak 280 Jam Pembelajaran (JP) dan dilanjutkan dengan kegiatan Magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Satker masing-masing sebanyak 360 JP. Laporan magang merupakan komponen terakhir dari penilaian peserta pelatihan untuk mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

Pembelajaran jarak jauh dilaksanakan tanggal 22 Februari s.d 9 April 2021 dan dilanjutkan kegiatan Magang/PKL di Satker masing-masing tanggal 13 April s.d 22 Juni 2021. Pengajar/fasilitator pada pelatihan ini adalah Pejabat Struktural dan Widyaiswara dari Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Peserta seluruhnya berjumlah 30 orang yang berasal dari 9 orang BPS Pusat (Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Humas dan Hukum, Inspektur Wilayah I), 1 orang Pusdiklat BPS dan 20 orang BPS Provinsi. Peserta yang sudah menduduki jabatan fungsional Arsiparis sebanyak 26 orang dan 4 orang masih merupakan Calon Arsiparis.

Materi yang dipelajari dalam pelatihan fungsional arsiparis tingkat ahli adalah tentang teori kearsipan, serta pemahaman tentang penyelenggaraan kearsipan, termasuk pengelolaan arsip baik arsip dinamis maupun arsip statis, mulai dari tahap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan, sampai pada tahap pengelolaan statis. Peserta pelatihan juga mendapatkan pengetahuan metode penelitian dan teknik penulisan ilmiah yang dapat membantu dalam pembuatan penulisan karya tulis ilmiah dan pembuatan manual kearsipan, serta pemahaman tentang jabatan fungsional Arsiparis dan angka kredit. Kemudian, di instansi masing-masing, peserta pelatihan melakukan

program aktualisasi yang dibuktikan dengan mengirimkan Laporan Kegiatan Magang untuk menerapkan pembelajaran di kelas.

Output dari pelatihan ini adalah jumlah peserta pelatihan fungsional arsiparis tingkat ahli yang mendapatkan STTPP. Dari 30 peserta yang mengikuti pelatihan, seluruhnya dinyatakan lulus pelatihan dan berhak mendapatkan STTPP.

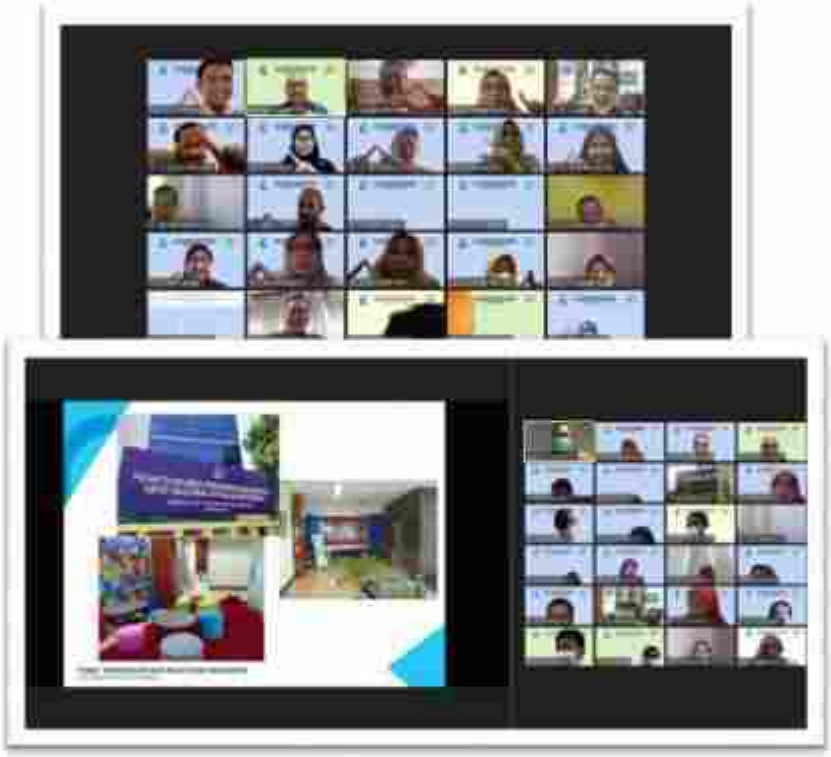

Gambar 36. Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh Pelatihan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli

2.2.2. Pelatihan Fungsional Auditor Tingkat Ahli

Pada tahun 2021 Pusdiklat BPS telah melaksanakan Pelatihan Fungsional Auditor Tingkat Ahli. Tujuan pelatihan tersebut untuk menjamin pembinaan profesi dan karier, kepangkatan dan jabatan bagi PNS yang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah dalam rangka memperoleh sertifikat auditor intern pemerintah.

Sasaran pelatihan adalah pegawai BPS yang akan melaksanakan tugas pada jabatan auditor tingkat ahli. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dengan mekanisme PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada tahun 2021.

Pelatihan pembentukan auditor ahli dilaksanakan dengan metode blended learning, yaitu perpaduan antara metode e-learning dengan metode pembelajaran jarak jauh (tatap muka online). Metode e-learning merupakan bagian tahap pembelajaran yang wajibdiikuti oleh setiap peserta. Setiap peserta harus menyelesaikan semua tahapan pembelajaran e-learning untuk setiap mata ajar sampai dengan mendapatkan sertifikat e-learning secara online. Sertifikat e-learning merupakan persyaratan untuk dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh (tatap muka online).

Pembelajaran e-learning dilaksanakan pada tanggal 22 Februari – 8 Maret 2021, dilanjutkan tanggal 15 – 31 Maret 2021 dengan metode pembelajaran jarak jauh (tatap muka online). Ujian sertifikasi auditor tingkat ahli dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2021.

Jumlah peserta yang mendaftar ke aplikasi BPKP sebanyak 34 orang. Dari hasil penetapan peserta pelatihan, sebanyak 33 orang lolos persyaratan administrasi sehingga dapat mengikuti pelatihan. Dari 33 orang yang mengikuti pelatihan, 15 orang berjenis kelamin laki-laki dan 18 orang berjenis kelamin perempuan. Peserta berasal dari Inspektorat Utama BPS sebanyak 31 orang dan 2 orang Pusdiklat BPS.

Pengajar dalam pelatihan ini adalah Widyaiswara Pusdiklatwas BPKP dan Pejabat Struktural dan fungsional Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP. Evaluasi terhadap peserta pelatihan adalah evaluasi nilai yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur-unsur penilaian sesuai persyaratan nilai yang ditentukan dalam aturan pedoman penyelenggaraan pelatihan.

Evaluasi nilai peserta dilakukan pada penilaian aktivitas, simulasi/latihan dan pre-post test. Hasil evaluasi nilai selama mengikuti pelatihan, seluruh peserta berhasil menyelesaikan tahap pembelajaran e-learning dan dapat melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Sampai akhir pelatihan, seluruh peserta berhasil menyelesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan. Setelah pelatihan selesai peserta mengikuti ujian sertifikasi dan seluruh peserta berhasil lulus ujian. Peserta berhak

mendapatkan Sertifikat Telah Mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama dan untuk bukti kelulusannya peserta juga akan menerima Sertifikat Auditor Ahli Pertama.

Gambar 37. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Fungsional Auditor Tingkat Ahli

2.2.3. Standardisasi dan Sertifikasi Refreshing dan Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelatihan PBJ Tingkat Dasar merupakan salah satu Pelatihan Teknis yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada SDM PBJ terhadap regulasi PBJ sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.Pelatihan pengadaan barang dan jasa juga ditujukan agar penyelenggara Negara memahami proses dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga akan dicapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya.

Pada tahun 2021 untuk membekali para PNS BPS dalam keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pusdiklat BPS bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar.

Kegiatan pelatihan dan ujian tahun 2021 ini masih dilaksanakan secara blended learning dikarenakan masih adanya pandemi Covid-19 sehingga pembelajaran dilaksanakan secara online / Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yaitu

peserta belajar mandiri secara online dengan memanfaatkan Learning Management System (LMS) LKPP, dan Tatap muka on line melalui zoom meeting, dan ujian sertifikasi dilaksanakan secara offline di laboratorium Komputer Pusdiklat BPS.

Pengajar/fasilitator pada pelatihan ini adalah Tenaga Pengajar/Widyaiswara/ Penceramah/Narasumber/Pakar/Praktisi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari LKPP maupun instansi lainnya. Output dari kegiatan ini adalah rancangan jadwal pelatihan dan pengajar/fasilitator pelatihan keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar tahun 2021.

Pada Tahun 2021 Akhir LKPP memberikan ijin penyelenggaraan Pelatihan PBJ kepada Pusdiklat BPS dan dilanjutkan dengan Ujian Sertifikasi. Metode pembelajarannya dengan blended learning, terbagi dalam pembelajaran seara mandiri *asynchronous* dan dilanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh secara tatap muka/*online*. Penyelenggaran pelatihan ada sebanyak 2 angkatan yang dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 27 Oktober – 11 November 2021 dengan masing-masing angkatan berjumlah 22 peserta dan 28 peserta.

Secara keseluruhan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan PBJ Tingkat Dasar pada tahun 2021 yaitu sebanyak 50 orang dan yang hanya mengikuti refreshing sebanyak 109 orang, sehingga total peserta sebanyak 159 orang. Jumlah peserta yang mengikuti ujian sertifikasi PBJ tahun 2021 sebanyak 159 orang.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta yang lulus mengikuti ujian sertifikasi PBJ. Seluruh peserta berhasil menyelesaikan pelatihan sampai dengan akhir pelatihan, dan peserta yang lulus ujian sertifikasi PBJ tingkat dasar yaitu sebanyak 86 peserta atau 54,08 persen peserta yang mendapat sertifikasi Pengadaan Barang Jasa merupakan output dari kegiatan ujian sertifikasi PBJ.

Evaluasi terhadap peserta pelatiahn ada bebeerapa jenis evaluasi akademik yang meliputi Tes materi, pre test, pos test dan try out dengan *passing grade* tes tiap materi pelatihan minimal nilai 80. Selain itu juga terdapat evaluasi

bagi pengajar dan penyelenggaraan pelatihan secara online untuk mengukur kinerja penyelenggara dan para fasiitator.

Output dari evaluasi penyelenggaraan pelatihan ini adalah nilai kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan, sedangkan output dari evaluasi pengajar adalah nilai kualitas dari pengajar pelatihan.

Gambar 38. Kegiatan Pembelajaran Refreshing PBJ Pemerintah

Gambar 39. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan PBJ Pemerintah

Gambar 40. Kegiatan Ujian Sertifikasi PBJ Pemerintah

SASARAN 2 : TERWUJUDNYA LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STATISTIK SEKTORAL DALAM KERANGKA SATU DATA INDONESIA

Sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS berkewajiban memberikan pembinaan kepada kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral. Data statistik sektoral yang dihasilkan sangat diperlukan untuk perencanaan, monitoring, maupun evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga data tersebut harus akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah, sesuai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019.

Cita-cita dalam Perpres tersebut dapat terwujud, jika seluruh instansi terkait khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) pada level Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan statistik sektoral sehingga memiliki kemandirian dalam penyediaan ragam statistik yang diperlukan.

Sejalan dengan cita-cita Satu Data Indonesia, pada tahun 2021 terdapat penambahan sasaran strategis yaitu terwujudnya layanan Pendidikan dan pelatihan sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia. Layanan ini diwujudkan dengan diselenggarakannya pelatihan statistik sektoral yang pesertanya meliputi internal dan eksternal BPS.

Dalam mewujudkan keberhasilan sasaran tersebut, capaian kinerja diukur melalui indikator persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan statistik sektoral.

Tabel 13. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ke 2 Tahun 2021

IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral	85	100	111,11

IKU 2 : Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral

Capaian kinerja pada IKU Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan statistik sektoral adalah sebesar 111,11 persen. Angka tersebut telah melampaui dari target yang diharapkan pada tahun 2021 yaitu dari target 85 persen telah terealisasi sebesar 100 persen. Karena IKU ini baru muncul pada tahun 2021, maka tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020.

Diklat Statistik Sektoral Kab/Kota

Dalam rangka mendukung tujuan dari sasaran strategis kedua, maka BPS melalui Pusdiklat BPS menyelenggarakan Pelatihan Statistik Sektoral kepada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2021.

Tujuan dari diadakannya pelatihan Statistik Sektoral adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam kegiatan statistik sehingga memiliki kemandirian dalam penyediaan ragam statistik yang dibutuhkan. Pelatihan Statistik Sektoral diselenggarakan secara virtual, mulai tanggal 30 Agustus sd 15 Oktober 2021, dibagi menjadi 7 (tujuh) angkatan, dimana masing-masing angkatan terdiri dari 4 (empat) kelas (A, B, C dan D).

Sebagai follow-up dari pelatihan secara virtual, peserta akan ditugaskan untuk menyusun working paper berupa Rancangan Kegiatan Statistik (RKS).

Tugas ini dikerjakan secara kelompok daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) dengan sistem coaching oleh para pengajar. Selanjutnya RKS ini akan dipaparkan dalam kegiatan Seminar RKS.

Peserta berasal dari BPS, Diskominfo, Bappeda/OPD dari 34 Provinsi dan 417 Kabupaten/ Kota, dimana setiap instansi diwakili oleh satu peserta. Dengan demikian jumlah sebanyak 1.319 yang terbagi menjadi 7 (tujuh) angkatan. Sedangkan, para pengajar pelatihan ini merupakan para fungsional statistisi, pranata Komputer, widyaiswara, dan fungsional lainnya yang berasal dari Pusdiklat dan tim SDI BPS.

Gambar 41. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Statistik Sektoral

Gambar 42. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Statistik Sektoral

TUJUAN 2 : MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM

SASARAN 3: TERWUJUDNYA SDM PUSDIKLAT BPS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN KOMPETENSI

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 203 ayat 4 dari peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit **20 (dua puluh) jam pelajaran** dalam 1 (satu) tahun.

Sejalan dengan itu, sasaran ketiga pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 adalah terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi. Sasaran ini sangat strategis, selain memenuhi 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun adalah juga dalam rangka menunjang layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara oleh Pusdiklat BPS.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Renstra Pusdiklat BPS Tahun 2020-2024 bahwa salah satu arah kebijakan dan strategis yang dilakukan untuk meningkatkan layanan penyelenggaraan diklat dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung *agile learning center* dan mengembangkan *e-learning*. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga pengajar yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya sesuai dengan materi diklat yang diajarkan kepada peserta diklat. Selain itu, dibutuhkan pula penyelenggara yang mampu melayani dengan baik yang *agile* dan modern berdasarkan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan diklat.

Pada tahun 2020, telah dilaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi pegawai baik struktural, widyaiswara/pengajar, maupun staf melalui penyelenggaraan diklat di Pusdiklat BPS atau Kementerian/Lembaga lain yang terkait. Selain diklat, ada pula yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi di luar Pusdiklat BPS dalam bentuk kursus, seminar, workshop, dan

yang lainnya baik sebagai peserta, nara sumber, maupun pengajar. Kegiatan tersebut ada yang diikuti melalui *online* dan ada pula melalui tatap muka.

Dalam mewujudkan keberhasilan sasaran tersebut, capaian kinerja diukur melalui indikator persentase SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi.

Tabel 14. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ke 3 Tahun 2021

IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Realisasi 2020	Perubahan terhadap realisasi 2020 (%) ((3)/(5)*100)-100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi	90	100	111,11	95	5,26

IKU 3 : Persentase SDM Pusdiklat BPS yang Melakukan Peningkatan Kompetensi

Capaian kinerja pada IKU Persentase SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi adalah sebesar 111,11 persen. Angka tersebut telah melampaui dari target yang diharapkan pada tahun 2021 yaitu dari target 90 persen telah terealisasi sebesar 100 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, naik sebesar 5,26 persen.

Pada Tabel di bawah ini ditampilkan jumlah pegawai Pusdiklat BPS yang mengikuti pengembangan kompetensi baik diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS maupun Instansi lainnya. Kegiatan tersebut dalam bentuk diklat, seminar, workshop, dan lainnya baik melalui online maupun tatap muka.

Tabel 15. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2021

No.	Kegiatan yang Diikuti	Jumlah Peserta		Peran Kegiatan (Peserta/Nara Sumber/Pengajar/ Panitia Penyelenggara)	Tempat/ Penyelenggara
		Target	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Train The Trainer "Infuential Trainers"	31	31	Peserta	Pusdiklat BPS
2.	PKN Tk. II	1	1	Peserta	Blended Learning, LAN Jakarta
3.	Diklat Pembentukan Auditor Ahli	2	2	Peserta	e-Learning dan PJJ
4.	Diklat Fungsional Arsiparis	1	1	Peserta	*Online*
5.	Pelatihan *Integrated Collection System* (ICS)	1	1	Peserta	*Online*
6.	*Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara (MKN) Dasar	2	2	Peserta	*Online*
7.	Diklat Pembuatan Video Pembelajaran dengan PPT	20	20	Peserta	Pusdiklat BPS
8.	Mini workshop Pelatihan Dasar CPNS	1	1	Peserta	Pusdiklat Pegawai Kemendikbud
9.	Pelatihan Kewidyaiswaraan Inpassing	4	4	Peserta	*Online*
10.	*Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara (MKN) Menengah	5	5	Peserta	*Online*

No.	Kegiatan yang Diikuti	Jumlah Peserta		Peran Kegiatan (Peserta/Nara Sumber/Pengajar/ Panitia Penyelenggara)	Tempat/ Penyelenggara
		Target	Realisasi		
11.	Praktek Kerja Lapangan Kearsipan	1	1	Peserta	
12.	*Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara (MKN) Menengah	1	1	Peserta	*Online*
13.	*Workshop* Pembelajran Latsar *Blended Learning*	42	42	Peserta	Pusdiklat BPS
14.	Diklat Pembuatan Video Pembelajaran dengan PPT	17	17	Peserta	Pusdiklat BPS
15.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	1	1	Peserta	*Online*
16.	Bimtek dan Sertifikasi Kompetensi Ahli Muda K3 Konstruksi secara daring	2	2	Peserta	*Online*
17.	*E-learning* JF Pranata dan Analis Pengelola Keuangan APBN angkatan IV	1	1	Peserta	*Online*
18.	Pelatihan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fungsional Statistisi Angkatan 2	1	1	Peserta	*Online*
19.	Workshop PKP	3	3	Peserta	*Online*

No.	Kegiatan yang Diikuti	Jumlah Peserta		Peran Kegiatan (Peserta/Nara Sumber/Pengajar/ Panitia Penyelenggara)	Tempat/ Penyelenggara
		Target	Realisasi		
20.	Pelatihan COBIT : Tata Kelola IT	3	3	Peserta	*Online*
21.	Workshop Calon Pengajar Latsar CPNS	1	1	Peserta	Hotel Mirah Bogor
22.	Peningkatan Manajemen Resiko & Pengendalian Intern melalui Penilaian Maturitas SPIP	4	4	Peserta	*Online*
23.	Mitigasi Risiko dan Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penerapan Konsep Probity Audit dan Probity Advise	2	2	Peserta	*Online*
24.	Workshop Executive Development Program (EDP)	16	16	Peserta	*Online*
25.	*Short Course* Bidang Hukum	3	3	Peserta	UNHAS, *Online*
26.	Seleksi/Uji Kompetensi Calon Widyaiswara	1	1	Peserta	*LAN Jakarta*
27.	Evaluasi dan Strategi Pengembangan Kompetensi SDM Pusdiklat BPS	57	57	Peserta	Hotel Grand Mercure Jogjakarta
28.	Workshop Pengembangan	59	59	Peserta	Paragon Hotel Solo

No.	Kegiatan yang Diikuti	Jumlah Peserta		Peran Kegiatan (Peserta/Nara Sumber/Pengajar/ Panitia Penyelenggara)	Tempat/ Penyelenggara
		Target	Realisasi		
	Kompetensi dan Pelayanan Diklat				
29.	Workshop Beauty Class	16	16	Peserta	Pusdiklat BPS
30.	Workshop Public Speaking dan Protokol Table Manner	11	11	Peserta	Pusdiklat BPS

Berikut ini dipaparkan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai Pusdiklat BPS yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS pada tahun 2021:

3.1. Evaluasi & Strategi Pengembangan Kompetensi SDM Pusdiklat BPS

Dalam rangka Evaluasi evaluasi atas capaian dan tantangan yang telah dilalui selama tahun 2021 dan menyusun strategi dalam memasuki agenda 2022 serta meningkatkan kemampuan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan perilaku (*attitude and behaviour*) bagi pegawai Pusdiklat BPS, pada tanggal 16 s.d. 20 November 2021 dilaksanakan rapat koordinator dengan tema "Pusdiklat BPS membangun SDM BPS: Tangguh, Bertumbuh, dan Berkarakter Pembelajar" yang bertempat di Hotel Grand Mercure Jogjakarta. Jumlah peserta sebanyak 130 orang terdiri dari 118 orang pegawai Pusdiklat BPS, pegawai BPS Provinsi Yogyakarta dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, alumni diklat, serta 12 nara sumber dari beberapa perguruan tinggi, LAN RI, dan penjamin mutu.

Kegiatan ini terdiri dari arahan Kepala Pusdiklat BPS dan paparan beberapa nara sumber dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kapasitas dan rasa percaya diri pegawai dalam berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak lain;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan;
3. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan sesuai dengan arah kebijakan pengembangan kompetensi pegawai BPS;

4. Meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan Program Rintisan Gelar.
5. Persiapan desentralisasi pengembangan *training center* di wilayah timur.

Gambar 43. Kegiatan Evaluasi & Strategi Pengembangan Kompetensi SDM Pusdiklat BPS di Yogyakarta

3.2. Workshop Pengembangan Kompetensi dan Pelayanan Diklat

Dalam rangka Pengembangan Kompetensi (Bangkom) ASN, diperlukan suatu langkah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini meliputi desain kurikulum, metode pembelajaran baik secara klasikal dan non klasikal, termasuk pengembangan kompetensi dalam bentuk coaching dan mentoring. Pelaksanaan pelatihan harus sesuai dengan kurikulum standar yang dikeluarkan oleh instansi pembina, berikut pedoman penyelenggaraan pelatihan tersebut. Oleh karena itu untuk diperlukan panduan Standar Pelayanan Minimum (SPM) penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan Pusdiklat BPS.

BPS sebagai instansi pembina jabatan fungsional pranata komputer (prakom), berkewajiban menyusun standarisasi kurikulum pelatihan fungsional prakom. Dengan terbitnya Permen PAN dan RB nomor 32 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, diperlukan penyusunan kurikulum serta modul pembelajaran yang akan digunakan dalam pelatihan fungsional prakom.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, maka Pusdiklat BPS melaksanakan kegiatan Workshop Pengembangan Kompetensi dan Pelayanan Diklat Pusdiklat BPS Tahun 2021. Hal ini sebagai langkah Pusdiklat BPS membangun SDM BPS Tangguh, Bertumbuh, dan Berkarakter Pembelajar.

Pelaksanaan workshop diselenggarakan di Paragon Hotel Solo Jawa Tengah selama 4 hari dari tanggal 3 s.d. 6 Desember 2021. Jumlah peserta sebanyak 88 orang terdiri dari 57 pegawai Pusdiklat BPS dan 4 orang dari Universitas Diponegoro dan UNS, 2 orang penjamin mutu, 2 orang dari LAN RI, 22 orang pegawai BPS Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kota Solo, serta dihadiri oleh Bapak Sekretaris Utama BPS.

Kegiatan ini terdiri dari arahan Sekretaris Utama dan mengundang beberapa nara sumber sebagai berikut:

1. Arahan Sekretaris Utama tentang pentingnya Triple Helix Collaboration (Komitmen Bersama) dalam rangka Tujuh Arah Perubahan BPS
2. Nara sumber dari LAN RI dengan tema Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi di Era New Normal
3. Pembentukan komisi untuk membahas Kehumasan, Pelatihan Prakom, Pengembangan Kompetensi, dan Pengembangan Pelayanan Diklat

Gambar 44. Workshop Pengembangan Kompetensi dan Pelayanan Diklat

3.3. Workshop Public Speaking dan Protokol Table Manner

Kemampuan dalam berkomunikasi tentunya sangat dibutuhkan bagi personal khususnya yang berkecimpung di dalam pelaksanaan pelayanan publik, seperti bagi pegawai Pusdiklat BPS. Kegiatan yang diikuti pegawai Pusdiklat ini bertujuan peningkatan kemampuan komunikasi serta performa diri yang dibutuhkan dalam pelayanan diklat. Narasumber pada pelatihan ini berasal dari StandardPlus Even Organization yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dalam mengisi dan menyelenggarakan acara seperti ini. Di akhir sesi kegiatan ini setiap peserta melakukan presentasi online selama 5 menit. Ini tentu saja akan menambah pengalaman bagi setiap peserta.

Pelatihan bersama John Robert Powers diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu pegawai khususnya yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dalam komunikasi, kepribadian, penampilan dan kehidupan sosial menjadi lebih baik lagi.

Pelatihan diselenggarakan pada tanggal 1-2 Desember 2021 dengan peserta 28 orang dari Dharma Wanita dan Pegawai Pusdiklat BPS. Fasilitator terdiri dari Dedi Setiadi untuk Publik Speaking dan Netty Merdiaty untuk Tabel Manner.

Gambar 45. Kegiatan Publik Speaking dan Table Manner

3.4. Kegiatan Pengembangan Diri 'Beauty Class Wardah'

Dalam rangka pengembangan diri dan peningkatan layanan, Pusdiklat BPS menyelenggarakan *beauty class* dengan narasumber Wardah Cosmetics pada tanggal 15 November 2021.

Gambar 46. Kegiatan Pengembangan Diri '*Beauty Class Wardah*'

3.5. Seminar dan Pameran Inovasi Alumni Diklat

Seminar dan pameran inovasi ini bertujuan peluncuran platform Pembelajaran Jarak Jauh berbasis teknologi informasi WARKOP (Warung Komptensi Pegawai) dan sosialisasi inovasi peserta Diklat agar dapat diterapkan/dimanfaatkan, direplikasi, dimodifikasi, atau dikembangkan. Replikasi atau modifikasi inovasi dapat membantu para penyelenggara pelayanan publik menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam acara kali ini Pusdiklat BPS mengundang beberapa alumni peserta diklat yang mempunyai inovasi berkaitan dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan kegiatan statistik.

Acara ini diselenggarakan pada tanggal 28 September 2021 di Pusdiklat BPS dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN).

Gambar 47. Seminar dan Pameran Inovasi Alumni Diklat

SASARAN 4 : TERJALINNYA KERJASAMA DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI YANG BERKESINAMBUNGAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan kedua Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu meningkatkan kompetensi SDM, maka salah satu sasarannya diarahkan untuk mencapai terjalinnya kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan. Salah satu kegiatan strategis yang dilakukan adalah melalui peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi penyelenggara rintisan gelar, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan rintisan gelar sangat ditentukan oleh keberhasilan peserta tugas belajar dalam menyelesaikan pendidikannya. Untuk memenuhi pencapaian kinerja dari sasaran strategis tersebut diukur melalui indikator persentase kelulusan peserta tugas belajar.

Tabel 16. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ke 4 Tahun 2021

IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Realisasi 2020	Perubahan terhadap realisasi 2020 (%) ((3)/(5)*100)-100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Kelulusan Peserta Tugas Belajar	90	100	111,11	100	0

IKU 4 : Persentase Kelulusan Peserta Tugas Belajar

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara BPS, salah satu sarana yang disediakan adalah melalui penyediaan program beasiswa Tugas Belajar (TB). Penyelenggaraan TB merupakan salah satu tugas Pusdiklat BPS dengan kegiatan mengirim dan mengelola TB bagi pegawai BPS baik di dalam maupun luar negeri. Program TB yang dimaksud di sini mencakup untuk program pendidikan gelar S2 dan S3, sehingga tidak ada untuk program pendidikan non gelar (*short course* dan *post doctoral*). Dari sisi pembiayaan, program TB yang diselenggarakan oleh Pusdiklat terdiri dari:

1. Beasiswa APBN BPS

Program ini adalah kerjasama rintisan gelar S2 maupun S3 antara BPS dengan perguruan tinggi yang ada di dalam negeri seperti UI, ITB, IPB, UGM, UNPAD, ITS, UNAIR, UNDIP, dan UNHAS.

2. Beasiswa APBN Non BPS

Program ini berupa tawaran beasiswa dari Bappenas atau Kementerian/Lembaga lain baik untuk program S2 dalam negeri, luar negeri, maupun Double Degree dan S3.

3. Beasiswa Non APBN

Penyedia utama beasiswa non APBN adalah STUNED untuk studi di Belanda dan AAS untuk studi di Australia. Selain itu terdapat pula beberapa negara sponsor beasiswa seperti Jepang, Jerman, Belanda, dan Swiss namun tidak ditawarkan setiap tahun.

4. Individu pegawai juga dapat mencari sendiri sponsor beasiswa.

Setelah mendapat izin dari atasannya (Eselon II), maka dapat diajukan ke Pusdiklat untuk mendapatkan status TB dengan menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar (SPTB) dan menerima Surat Keputusan Tugas Belajar (SKTB) dari Biro Kepegawaian.

Pelaksanaan program TB Rintisan Gelar (APBN) didahului adanya *Memorandum of Understanding* (MOU) antara BPS dengan Universitas/Perguruan Tinggi (Univ/PT), yang dilanjutkan dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama setiap akan mengirim calon mahasiswa baru. Pusdiklat BPS juga menyusun dan mengajukan rencana biaya pendidikan, tunjangan hidup, buku, dan riset peserta Tugas Belajar APBN dan merencanakan jumlah pegawai yang akan ditugasbelajarkan.

Penyelenggaraan program beasiswa APBN BPS merupakan salah satu wujud layanan Pusdiklat BPS untuk mengakomodir pegawai BPS melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program beasiswa APBN BPS yang selama ini berjalan meliputi program studi ilmu statistik, ekonomi, kependudukan, dan teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan ilmu lainnya dalam menunjang pekerjaan BPS telah ditambahkan program studi Ilmu Akuntansi dan Ilmu Psikologi pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 telah mengembangkan kembali ilmu lainnya yaitu Ilmu Komputer dan Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. Selain penambahan jurusan, pada tahun 2020 telah pula dijalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya yaitu Universitas Hasanuddin Makassar untuk S2 Jurusan Kependudukan dan penambahan jurusan kependudukan untuk S3 di UGM.

Pada tahun 2021, pengembangan ilmu dilakukan kembali untuk jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Hasanuddin Makassar, jurusan Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia dan Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Manajemen (SDM dan Keuangan) di Universitas Airlangga dan Universitas Sebelas Maret. Selain itu ada pula program double degree program studi Sains Ekonomi dan Master of Applied Economics Kerjasama IPB dengan Australia.

Dari program-program tersebut diharapkan dapat menyiapkan calon-calon pimpinan BPS yang akan menduduki jabatan struktural BPS baik di pusat maupun daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pejabat fungsional seperti fungsional pranata komputer, statistisi, peneliti, widyaiswara, dosen, dan sebagainya.

Jumlah pegawai yang mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai APBN BPS pada tahun 2021 adalah sebanyak 183 orang (Tabel 11). Mereka tersebar di beberapa perguruan tinggi yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB) program studi Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) program studi Statistika, Universitas Padjadjaran (Unpad) program studi Statistika dan Komunikasi, Universitas Indonesia (UI) program studi ketenagakerjaan, ekonomi, psikologi, komputer, komunikasi, dan administrasi, Universitas Gadjah Mada (UGM) program studi Ekonomi dan Kependudukan, Universitas Airlangga (Unair) program studi ekonomi, manajemen, dan akuntansi, Institut Pertanian Bogor (IPB) program studi Statistika, Universitas Diponegoro (Undip) program studi akuntansi, Universitas Hasanuddin (Unhas) program studi kependudukan dan hukum, Universitas Brawijaya program studi administrasi public, dan Universitas Sebelas Maret program studi Manajemen SDM dan Manajemen Keuangan. Dari APBN BPS terdapat pegawai yang memperoleh beasiswa melalui double degree sebanyak 7 orang. Selain itu, terdapat beasiswa dari APBN non BPS baik di dalam negeri maupun luar negeri sebanyak 69 orang.

Tabel 17. Jumlah Pegawai BPS yang memperoleh Beasiswa S2 dan S3 Tahun 2021

No	Program Beasiswa	Sponsor					Jumlah Tugas Belajar
		APBN BPS		APBN Non BPS			
		Dalam Negeri	Double Degree	Dalam Negeri	Luar Negeri	Double Degree	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	S2	152	7	44	21	-	224
2	S3	24		1	3	-	28
Jumlah		176	7	45	24	-	252

Capaian kinerja yang diperoleh pada indikator persentase kelulusan peserta tugas belajar adalah sebesar 111,11 persen, dimana capaiannya telah melebihi dari target yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya pelayanan Pusdiklat BPS yang berkinerja baik dalam menangani semua permasalahan penyelenggaraan TB baik dalam hal penanganan pemberian uang saku/biaya hidup, uang buku, uang riset, maupun biaya pendidikan. Selain itu pula kelancaran dalam hal penanganan peserta yang akan mengikuti ujian tesis baik penyediaan penguji maupun operasional lainnya.

Meskipun ada sedikit kendala dalam pengelolaan TB tahun 2020 yaitu dengan adanya Pandemi Virus Corona (COVID-19), hampir semua kampus yang bekerjasama dengan BPS ditutup total sehingga komunikasi hanya dapat dilakukan secara online. Oleh karena itu, pengelolaan Tugas Belajar APBN mengalami sedikit keterlambatan dalam proses pengurusan administrasinya antara mahasiswa, kampus, dan pembiayaan (Perjanjian Kerjasama, Surat Keterangan Lulus, kegiatan sidang, dan lain-lain). Namun hal ini tidak menyurutkan Pusdiklat BPS dalam mencapai kinerja yang lebih baik, guna mewujudkan layanan diklat sekaligus untuk peningkatan dan pengembangan SDM pegawai BPS yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Kendala

lainnya adalah Jadwal keberangkatan peserta Tugas Belajar APBN BPS Program Splitsite IPB-Universitas of Adelaide juga mengalami penundaan sehingga masa studi peserta menjadi diperpanjang selama 2 semester menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan ke Australia.

Pada indikator kelulusan peserta tugas belajar bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 tidak terdapat perbedaan yaitu masing-masing mencapai 100 persen.

Gambar 48. Inisiasi Kerjasama Rintisan Gelar dengan Universitas Brawijaya

Gambar 49. Inisiasi Kerjasama Tugas Belajar Program Splitsite Double Degree sponsor APBN BPS-Australia Awards antara Universitas Airlangga dan University of Western, Australia.

Gambar 50. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Rintisan Gelar sponsor APBN BPS dan Rencana Kegiatan Shortcourse dengan Universitas Diponegoro

Gambar 51. Monitoring dan Evaluasi Rintisan Gelar Sponsor APBN BPS di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, PNS yang ingin meningkatkan kemampuan dan keahliannya dalam rangka mendukung tugas sebagai aparatur negara, dapat mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri melalui jalur Izin Belajar (IB). Pendidikan melalui IB dilakukan di luar jam kerja sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan.

Pusdiklat BPS sebagai pengelola IB melakukan kegiatan pelaksanaan pemberian IB dan mengadministrasikannya bagi pegawai BPS yang ingin melanjutkan sekolah melalui jalur IB. Seluruh IB program S2 dan S3 diproses oleh Pusdiklat dengan mendapat rekomendasi/persetujuan dari Sekretaris Utama (Sestama). Sementara itu untuk pegawai yang akan melanjutkan ke jenjang S1, bagi pegawai BPS Pusat surat IB-nya dibuat oleh Pusdiklat sedangkan bagi pegawai BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dibuat oleh Kepala BPS Provinsi yang ditembuskan ke Pusdiklat dan Biro Kepegawaian.

Tabel 18. Jumlah Pegawai BPS yang Menempuh Pendidikan Melalui Izin Belajar Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Izin Belajar
1	S1	9
2	S2	96
3	S3	10

SASARAN 5 : PENGUATAN MANAJEMEN INTERNAL DAN SUMBERDAYA

Kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi pokok Pusdiklat BPS dalam mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam penguatan manajemen internal dan sumberdaya melalui akuntabilitas kinerja yang transparan. Akuntabilitas kinerja yang transparan sangat diperlukan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan diwujudkan melalui indikator hasil penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS tahun 2021. Sasaran tersebut dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Pusdiklat BPS dalam mengemban tugas di bidang pendidikan dan pelatihan.

Tabel 19. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ke 5 Tahun 2021

IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Realisasi 2020	Perubahan terhadap realisasi 2020 (%) ((3)/(5)*100)-100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Penilaian SAKIP	70	64,72*)	92,46	64,72	0
Rata rata Capaian Kinerja					

Catatan: *) Nilai SAKIP tahun 2021 menggunakan realisasi tahun 2020 karena untuk tahun 2021 nilai belum tersedia

IKU 5 : Hasil Penilaian SAKIP

Salah satu hal yang menjadi inti dari reformasi birokrasi adalah akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting keberadaannya mengingat semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. Pusdiklat BPS sebagai salah satu unsur dari instansi pemerintah juga harus meningkatkan akuntabilitasnya. Akuntabilitas dimaksud tidak hanya dari sisi keuangan saja, meskipun dari sisi tersebut mutlak diperlukan melainkan juga dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas ini, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan

menghasilkan pelayanan prima baik kepada pegawai BPS maupun instansi lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi yang dilakukan dalam rangka penilaian SAKIP ditujukan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusdiklat BPS dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Dalam evaluasi SAKIP komponen yang dinilai terdiri atas :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Masing-masing komponen tersebut terbagi lagi ke dalam evaluasi sub komponen:

1. Perencanaan Kinerja
    a. Perencanaan Strategis
        1). Pemenuhan Renstra
        2). Kualitas Renstra
        3). Implementasi Renstra
    b. Perencanaan Kinerja Tahunan
        1). Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan
        2). Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan
        3). Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan
2. Pengukuran Kinerja

a. Pemenuhan Pengukuran

b. Kualitas Pengukuran

c. Implementasi Pengukuran

3. Pelaporan Kinerja

a. Pemenuhan Pelaporan

b. Kualitas Informasi Kinerja

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

4. Evaluasi Kinerja

a. Pemenuhan Evaluasi

b. Kualitas Evaluasi

c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja

a. Kinerja yang Dilaporkan (Output)

b. Kinerja yang Dilaporkan (Outcome)

Sebagai acuan dalam pencapaian sasaran penguatan manajemen internal dan sumberdaya adalah melalui indikator hasil penilaian SAKIP. Indikator tersebut dapat menggambarkan bahwa semakin tinggi realisasi penilaian SAKIP menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Hasil penilaian SAKIP pada tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Inspektorat, sehingga sementara ini masih disamakan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020, angka hasil penilaian SAKIP adalah sebesar 64,72 poin sedangkan target PK 2021 adalah sebesar 70 poin. Berdasarkan nilai tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 92,46 persen yang artinya bahwa tingkat pencapaian kinerja yang diperoleh kurang dari target yang diharapkan. Angka ini memacu Pusdiklat BPS untuk selalu memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

IKU 6 : Persentase Pengembangan dan Pembaharuan Infrastruktur

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat BPS, tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Saat ini dengan adanya pembelajaran secara blended (offline dan online) dibutuhkan pengembangan dan pembaharuan infrastruktur melalui teknologi dan informasi kea rah digitalisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2021 terdapat IKU kedua pada sasaran strategis kelima yaitu persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur.

Tabel 20. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ke 5 Tahun 2021

IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur	90	97,46	108,29

Perhitungan pada indikator ini merupakan perbandingan antara realisasi biaya pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur dengan jumlah total biaya pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur yang tersedia. Pada tahun 2021, diperoleh realisasi pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur sebesar 97,46 persen dari target 90 persen.

Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Terhadap Target Renstra 2020-2024

Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang

formal untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pada periode Renstra 2020-2024. Berdasarkan Tabel 14, jika dibandingkan target Renstra tahun 2021, maka sebagian besar capaian indikator dari tujuan dan sasaran menunjukkan hasil yang maksimal, yaitu diperoleh nilai realisasi lebih dari target yang diharapkan sehingga capaian kinerjanya melebihi dari 100 persen.

Capaian realisasi pada indikator pertama yaitu persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat sebesar 90 persen. Angka tersebut sama dengan target Renstra tahun 2021, sehingga capaian terhadap Renstra adalah 100 persen. Keberhasilan ini berkat upaya dan kerja keras dari seluruh pihak terkait dan diharapkan agar di masa mendatang diperoleh capaian kinerja yang lebih tinggi mengingat indikator kepuasan peserta diklat dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan Pusdiklat BPS dalam menyelenggarakan kegiatan diklat.

Pada indikator kedua yaitu persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral berhasil melebihi target Renstra 2021 yaitu dengan target sebesar 85 persen diperoleh realisasi sebesar 100 persen sehingga capaiannya adalah sebesar 117,65 persen.

Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi merupakan indikator ketiga juga telah berhasil melebihi target yaitu dengan target Renstra 2021 sebesar 90 persen diperoleh realisasi sebesar 100 persen sehingga capaiannya adalah sebesar 111,11 persen.

Capaian indikator keempat yaitu persentase kelulusan peserta tugas belajar juga telah melebihi dari target Renstra 2020 yaitu dengan target Renstra 2021 sebesar 90 persen diperoleh realisasi sebesar 100 persen sehingga capaiannya adalah sebesar 111,11 persen.

Pada indikator kelima yaitu hasil penilaian SAKIP, belum dapat diperoleh capaian yang diperoleh nilai sebenarnya karena penilaian masih mengacu pada

nilai tahun 2020 yaitu sebesar 64,72 poin sehingga dari target Renstra 2021 sebesar 70 poin diperoleh capaian dibawah 100 yaitu 92,46 persen.

Indikator terakhir yaitu persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur diperoleh nilai capaian 108,29 persen. Angka tersebut telah melebihi target yaitu realisasi 97,46 persen dari target Renstra 90 persen. Dengan capaian kinerja diatas 100 persen diperlukan penajaman target pada Renstra 2020-2024 agar pengukuran keberhasilan Pusdiklat BPS terhadap indicator-indikator tersebut lebih tergambarkan.

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021	Realisasi	Capaian terhadap Target 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1: Meningkatkan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Yang Adaptif				
SS1: Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku				
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	90	90	100,00
SS2: Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia				
Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral	Persen	85	100	117,65
T2: Meningkatkan kompetensi SDM				
SS2: Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi				
Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	Persen	90	100	111,11
SS3: Terjalinnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan				
Persentase kelulusan peserta tugas belajar	Persen	90	100	111,11
SS4: Penguatan manajemen internal dan sumberdaya				
Hasil penilaian SAKIP	Poin	70	64,72	92,46

3.4. Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS Tahun 2021

Kegiatan yang menjadi prioritas Pusdiklat BPS pada tahun 2021 ini masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu pelaksanaan pelatihan dasar atau Latsar CPNS formasi penerimaan tahun 2020. Namun, karena belum terbitnya SK penugasan atau penempatan mereka di satuan kerja BPS di daerah, maka di awal tahun yaitu bulan Januari 2021 BPS mendahulukan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas bagi para pejabat pengawas baik yang ada di pusat maupun daerah.

Setelah para CPNS bertugas dan ditempatkan di masing-masing satuan kerja baik di pusat maupun daerah, Pusdiklat BPS mengatur jadwal pelaksanaan Latsar CPNS BPS sejak bulan Juni sampai dengan November 2020. Penyelenggaraan Latsar bagi para CPNS baik golongan II maupun golongan III berasal dari lulusan Politeknik Statistika STIS dan beberapa lulusan Program Diploma PKN STAN.

Untuk kegiatan pelatihan teknis yang menjadi prioritas adalah :

a. Pelatihan Statistik Sektoral Kabupaten/Kota, pesertanya berasal dari BPS Kabupaten/Kota, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik), serta Organisasi Perangkat Desa/Produsen Data.

b. Pelatihan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga yang pesertanya berasal dari beberapa Pusdatin, Pusdiklat, dan Organisasi Perangkat Desa/Produsen Data Kementerian/Lembaga.

Tujuan diklat untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan agar mampu menjalankan tugas walidata statistik sektoral di daerah dan membantu walidata dalam membina produsen data di daerahnya.

3.5 Upaya Efisiensi di Pusdiklat BPS

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara (BPS), Pusdiklat BPS merealisasikan penggunaan anggaran berdasarkan pagu yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Penggunaan

anggaran dilakukan senantiasa mengacu pada prinsip 3E (efektif, efisien, dan ekonomis) dalam menghasilkan output yang berkualitas. Efisiensi diperlukan dalam menggunakan anggaran yang ada dengan bijak untuk merealisasikan rencana kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang maksimal. Dengan adanya angka efisiensi, dapat ditelaah lebih lanjut apakah kinerja organisasi sudah efektif atau hanya pemborosan anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, efisiensi didapatkan dengan cara sebagai berikut:

Pada peraturan yang sama juga dinyatakan bahwa batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%. Dengan asumsi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin efisiensinya semakin mendekati 20% maka kinerja kegiatan dan anggaran semakin baik, begitu pula sebaliknya. Dengan menggunakan rumus di atas, didapatkan angka efisiensi Pusdiklat BPS pada tahun 2021 sebesar 18,94 persen. Agar lebih mudah diinterpretasikan, Efisiensi dapat dikonversi menjadi skala 0% - 100%. Merujuk pada peraturan yang sama, Nilai Efisiensi dengan skala 0-100% didapatkan dengan cara sebagai berikut:

Dengan menggunakan rumus di atas, maka Nilai Efisiensi sebesar 18,94 dapat dikonversi menjadi 97,35%. Dari nilai efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja kegiatan serta anggaran Pusdiklat BPS sudah sangat baik.

Beberapa upaya efisiensi yang dilakukan Pusdiklat BPS adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Sistem Back Offoce (BO)

Sistem BO merupakan system informasi terintegrasi mulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, penggunaan

anggaran, serta monitoring anggaran. Pada Tahun 2020,

Sistem BO telah diperluas fungsinya sehingga setiap stakeholder terkait dapat memantau penggunaan dan penyerapan anggaran di setiap unit kerja.

Dengan menggunakan sistem ini membuat seluruh pekerjaan terkait penggunaan anggaran menjadi efisien dari segi waktu. Dari segi anggaran juga meminimalisir penggunaan kertas dimana Form Usulan sudah berbentuk softcopy serta meminimalisir kesalahan dalam pembuatan surat tugas maupun dokumen lainnya karena pembuatannya telah menggunakan sistem sehingga tidak perlu mencetak dokumen berulang-ulang.

2. Pelaksanaan Diklat dilakukan melalui online

Pelatihan yang dilaksanakan Pusdiklat BPS dilakukan melalui sistem online aplikasi WARKOP Pusdiklat BPS. Dengan sistem ini semakin menghemat tenaga, biaya dan sumberdaya, sehingga lebih efektif dan efisien, serta dapat mencakup lebih banyak peserta.

3. Penggunaan sensor gerak lampu pada setiap toilet

Pusdiklat BPS melengkapi seluruh toilet dengan sensor gerak yang fungsinya agar mematikan lampu secara otomatis apabila tidak ada orang yang menggunakan toilet dalam rentang waktu tertentu. Hal ini membuat penggunaan listrik menjadi lebih hemat.

4. Penghematan penggunaan kertas

Seminar evaluasi proyek perubahan pada PKP maupun PKA tidak lagi mencetak hasil laporan seminar, karena sudah menggunakan wadah pada web aplikasi WARKOP Pusdiklat BPS. Begitu pula penggunaan kertas di kantor dilakukan seminimal mungkin seperti undangan rapat sudah dilakukan melalui aplikasi we meet, laporan kegiatan harian pegawai melalui aplikasi KHI (Kegiatanku Hari Ini), dan untuk pemberitahuan gaji, uang makan, TK dan lain-lain dilakukan melalui notifikasi WA Booth.

Efisiensi yang dilakukan pada beberapa pos anggaran program Dukungan Manajemen tersebut dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan lain baik yang belum diposkan anggarannya maupun kegiatan yang masih mengalami kekurangan anggaran. Beberapa pemanfaatan anggaran diutamakan untuk

memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Selain itu, digunakan pula untuk menambah diklat yang sangat dibutuhkan seperti Diklat Statistik Sektoral, Pelatihan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), Short Course Bidang Hukum, Executive Development Program (EDP) yang diikuti seluruh pejabat Eselon II dan III seluruh kabupaten/kota, Executive Leaders Workshop (ELW) yang diikuti oleh pejabat Eselon I, dan lain-lain.

Pemanfaatan juga dilakukan terhadap kegiatan yang masih kekurangan anggaran yaitu pengelolaan rintisan gelar (tugas belajar) yang dibiayai APBN BPS. Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, beberapa perguruan tinggi ditambah jurusan/program studinya sesuai dengan kebutuhan BPS. Dari berbagai tindakan efisiensi yang dilakukan sudah diuji, dihitung, dan terutama disetujui oleh pimpinan dengan melalui berbagai pertimbangan, sehingga anggaran tersebut benar-benar terserap dan dimanfaatkan dengan output yang tepat.

3.6. Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Tahun 2021

Pagu Anggaran Menurut Program dan Sumber Dana

Selain dari sisi SDM, keberhasilan pencapaian kinerja sangat didukung oleh anggaran yang tersedia di Pusdiklat BPS. Dukungan dana tersebut diwujudkan melalui satu program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan satu kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS). Keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Kepala Pusdiklat BPS beserta jajarannya atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021 Pusdiklat BPS menerima pagu sebesar Rp. 71,81 miliar yang seluruhnya terdiri dari Program Dukungan Manajemen. Karena pada tahun 2021 masih terjadi pandemic COVID-19, seluruh anggaran Kementerian/Lembaga termasuk juga BPS direfocusing untuk penanganan covid di Indonesia sehingga pagu anggaran Pusdiklat BPS direvisi menjadi Rp 69,54 miliar atau berkurang sebesar 2,27 miliar. Total penggunaan anggaran Pusdiklat BPS pada tahun 2021

sebesar Rp 65,01 miliar dengan kata lain realisasi anggaran Pusdiklat BPS pada tahun 2021 mencapai 93,49 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang penyerapannya sebesar 91,51 persen, penyerapan tahun 2021 merupakan prestasi yang membanggakan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19.

Bila dilihat menurut sumber dana, pagu anggaran yang tersedia terdiri dari Rp. 50.028.894.000,- atau 97,64 persen berasal dari rupiah murni dan sisanya Rp 1.210.680.000,- atau 2,36 persen berasal dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Tabel 22. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Dalam Program Dukman Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2021

Sumber Dana	Pagu Anggaran (Miliar Rp)	Realisasi Anggaran (Miliar Rp)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Rupiah Murni	68,12	64,98	93,44
PNBP	1,42	0,03	0,05
Total	**69,54**	**65,01**	**93,49**

Dari Tabel 22 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang berasal dari PNBP hanya 0,05 persen dari pagu yang tersedia. Kendala teknis yaitu karena terdapat perubahan regulasi terkait pelatihan pranata komputer dan statistisi, sehingga pada tahun 2021 pelatihan tersebut yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan masih menunggu kurikulum baru. Sementara itu untuk Latsar golongan II/III, PKP, dan PKA pada tahun 2021, Pusdiklat lebih mendahulukan pelatihan internal, sehingga peserta dari luar BPS tidak bisa diikutsertakan karena keterbatasan tempat menginap dan jadual pelatihan.

Tabel 23. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Dalam Program Dukman Menurut Rincian Belanja Tahun Anggaran 2021

Rincian Belanja (Akun 2 Digit)	Pagu Anggaran Terakhir (miliar rupiah)	Realisasi Anggaran (miliar rupiah)	Persentase Realisasi (%)
51 Belanja Pegawai	11,42	11,27	98,67 %

Rincian Belanja (Akun 2 Digit)	Pagu Anggaran Terakhir (miliar rupiah)	Realisasi Anggaran (miliar rupiah)	Persentase Realisasi (%)
52 Belanja Barang	52,46	48,07	91,63 %
53 Belanja Modal	5,66	5,67	99,97 %
Total	**69,54**	**65,01**	**93,49**

Pada Tabel di atas dapat dilihat realisasi anggaran Pusdiklat BPS selama tahun 2021 berdasarkan rincian belanja. Belanja pegawai sudah dilakukan secara maksimal dengan realisasi 98,67 persen. Namun, belanja barang sebesar 91,63 persen terkendala dengan adanya pandemic COVID-19, sehingga pelaksanaan diklat sebagian besar dilakukan secara online. Sementara itu, untuk pencapaian realisasi pada belanja modal hampir mendekati 100 persen yaitu 99,97 persen dari pagu anggaran yang tersedia. Belanja modal yang telah direalisasikan berupa pengadaan perangkat teknologi dan komunikasi, peralatan fasilitas perkantoran, dan rehabilitasi gedung/bangunan. Dengan tersedianya belanja modal tersebut sangat menunjang kelancaran penyelenggaraan diklat.

Pagu Anggaran menurut Sasaran Strategis

Dalam rangka menunjang pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang tertuang pada masing-masing indikator, diperlukan anggaran yang memadai sehingga dapat tercapat sesuai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah tabel yang memuat penjelasan terkait penganggaran tahun 2021 berdasarkan Sasaran Strategis.

Tabel 24. Anggaran Pusdiklat BPS Tahun 2021 Menurut Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja

Tujuan/Sasaran Strategis	Pagu Akhir	Realisasi	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
T1. Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan				
SS1.1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku	16,61	13,55	81,58	100,00
SS1.2. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia	0,22	0,20	91,00	117,65
T2. Meningkatnya Kompetensi SDM				
SS2.1. Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi	0,68	0,60	88,23	111,11
SS2.2. Terjalinnya kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan	26,25	25,65	97,71	111,11
SS2.3. Penguatan manajemen internal dan sumberdaya	25,78	25,01	97,01	108,29
JUMLAH	**69,54**	**65,01**	**93,49**	**106,76**

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum penggunaan anggaran pada Pusdiklat BPS telah Optimal dan Efisien. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 106,76 persen dengan realisasi anggaran 93,49 persen. Berdasarkan tabel 24, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran terbesar diserap oleh Sasaran Strategis keempat yakni terjalinnya kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan mencapai 97,71 persen. Penggunaan anggaran tersebut

untuk membayar biaya pendidikan seluruh peserta tugas belajar, bantuan biaya hidup per bulan, bantuan uang buku dan referensi per tahun, bantuan riset/penelitian/seminar per tahun, biaya perjalanan pemanggilan dan pemulangan peserta tugas belajar, dan biaya perjalanan dalam rangka kerjasama perguruan tinggi. Sejalan dengan pencapaian targetnya yang melebihi nilai target yang ditentukan, dapat disimpulkan bahwa program kerjasama dengan Perguruan Tinggi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pegawai BPS. Pencapaian ini setara dengan penyerapan anggaran yang terealisasi.

Sebaliknya, realisasi terendah berada di Sasaran Strategis pertama Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku dengan penyerapan anggaran sebesar 81,58 persen. Bila dilihat dari pencapaian target untuk sasaran strategis pertama ini telah mencapai target yaitu 100,00 persen. Hal ini menggambarkan bahwa layanan pendidikan dan pelatihan tetap terlaksana dengan baik, namun karena adanya pandemi COVID-19 kegiatannya dilakukan secara online sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar.

Pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk tahun yang akan datang bahwa semangat kinerja yang sudah ada agar terus dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan. Dalam rangka mendukung peningkatan capaian kinerja, pengelolaan anggaran yang baik harus didukung pula dengan perencanaan yang matang. Hal ini masih menjadi poin penting yang perlu mendapat perhatian bukan hanya dari pimpinan tetapi juga dari masing-masing *subject matter*. Sejalan dengan aktifitas dan kegiatan diklat yang telah dijadwalkan, anggaran pun harus dikelola dan direncanakan dengan baik-baiknya, sehingga dapat terserap dengan baik pula sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Seiring dengan tuntutan BPS untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas serta pelayanan yang prima kepada pengguna data, Pusdiklat BPS juga dihadapi tantangan untuk menyediakan SDM yang lebih berkualitas melalui peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan BPS. Untuk memenuhi tantangan yang dihadapi dan mempermudah pencapaiannya, Pusdiklat BPS menyusun dua tujuan capaian kinerja, lima sasaran strategis dan enam indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2021.

Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Pusdiklat BPS telah tercapai dengan baik, dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 106,76 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 106,07. Hal ini merupakan satu pencapaian yang sangat baik untuk tahun kedua periode Renstra 2020 - 2024. Tingkat capaian kinerja yang telah dicapai mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pusdiklat BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi visi dan misi Pusdiklat BPS.

Baik secara total maupun masing-masing sasaran memiliki nilai capaian pada angka 100 persen ke atas, kecuali pada penilaian SAKIP. Dalam hal ini diperlukan peningkatan kinerja yang antara lain peningkatan akuntabilitas kinerja, agar proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja berjalan dengan baik sehingga mendapatkan penilaian SAKIP oleh Inspektorat lebih baik lagi. Peningkatan juga perlu ditingkatkan dalam pemenuhan layanan sarana prasarana di Pusdiklat agar peserta diklat merasa puas dalam penyelenggaraan diklat.

Secara umum penggunaan anggaran Pusdiklat BPS pada tahun 2021 telah Optimal dan Efisien. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 106,76 persen dengan penyerapan anggaran 93,49 persen. Diharapkan pencapaian pada tahun depan dapat lebih meningkat lagi. Untuk itu perlu meningkatkan pengawasan/monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga realisasi penyerapan anggaran dapat sejalan dengan pencapaian kinerja.

4.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan kinerja di tahun mendatang adalah:

1. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja perlu dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 berupa penajaman indikator maupun target kinerja sehingga pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis meningkat baik secara kualitas maupun relevansinya.
2. Untuk menghadapi tantangan di Era Next Normal, **Framework C S S "*Continue – Stop –Start*"** yaitu Melanjutkan yang sudah berjalan baik; Menghentikan yang kurang baik; dan Memulai inisiatif baru yang inovatif akan terus disosialisasikan dan diimplementasikan dengan lebih intens melalui pola *Team Work* sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.
3. Dalam rangka meningkatkan capaian indikator "kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat", akan terus dilakukan penyempurnaan strategi pembelajaran melalui digitalisasi perangkat komunikasi dan teknologi serta pemenuhan sarana prasarana yang lebih baik.
4. Meningkatkan pemasaran produk-produk inovasi yang telah dilaksanakan peserta diklat.
5. Dalam rangka meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai, terus berupaya memperbaiki sistem pembelajaran melalui "WARKOP"(Warung Kompetensi Pegawai).

6. Melanjutkan pelaksanaan Pelatihan Statistik Sektoral dan mewujudkan "Desa Cantik" (Cinta Data Statistik).
7. Memperluas cakupan kerjasama dengan Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri melalui jurusan/program studi baru serta program *Double Degree*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Renstra Pusdiklat BPS 2020-2024

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T1. Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan yang Adaptif					
SS.1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku					
Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	85%	90%	90%	92%	92%
T2. Meningkatkan kompetensi SDM					
SS.2. Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi					
Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	90%	90%	90%	90%	90%
SS.3. Terjalinnya kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan					
Persentase Kelulusan Peserta Tugas Belajar	90%	90%	90%	90%	90%
SS.4. Penguatan manajemen internal dan sumberdaya					
Hasil Penilaian SAKIP	70	70	70	70	70

Lampiran 2. Reviu I Renstra Pusdiklat BPS 2020-2024

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T1. Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan yang Adaptif					
SS.1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku					
Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	85%	90%	90%	92%	92%
SS.2. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia					
Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral	-	85%	85%	85%	85%
T2. Meningkatkan kompetensi SDM					
SS.3. Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi					
Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	90%	90%	90%	90%	90%
SS.4. Terjalinnya kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan					
Persentase Kelulusan Peserta Tugas Belajar	90%	90%	90%	90%	90%
SS.5. Penguatan manajemen internal dan sumberdaya					
Hasil Penilaian SAKIP	70	70	70	70	70
Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur	-	90%	90%	90%	90%

Lampiran 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS 2021

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eni Lestariningsih S.Si, M.A
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
Jabatan : Sekretaris Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Februari 2021

Pihak Kedua

Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
NIP. 19630605 198702 1 001

Pihak Pertama

Eni Lestariningsih S.Si, M.A
NIP. 19700310 199401 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif			
Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku	Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	90
Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia	Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral	Persen	85
Tujuan 2. Meningkatkan kompetensi SDM			
Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi	Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	Persen	90
Terjalinnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan	Persentase kelulusan peserta tugas belajar	Persen	90

Penguatan manajemen internal dan sumberdaya	Hasil penilaian SAKIP	Poin	70
	Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur	Persen	90

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	Rp. 71.806.074.000
Jumlah	**Rp. 71.806.074.000**

Jakarta, 8 Februari 2021

Pihak Kedua

Dr. Mateo Yunanto S.Si, M.Si
NIP. 19630605 198702 1 001

Pihak Pertama

Eni Lestariningsih S.Si, M.A
NIP. 19700310 199401 2 001

Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021
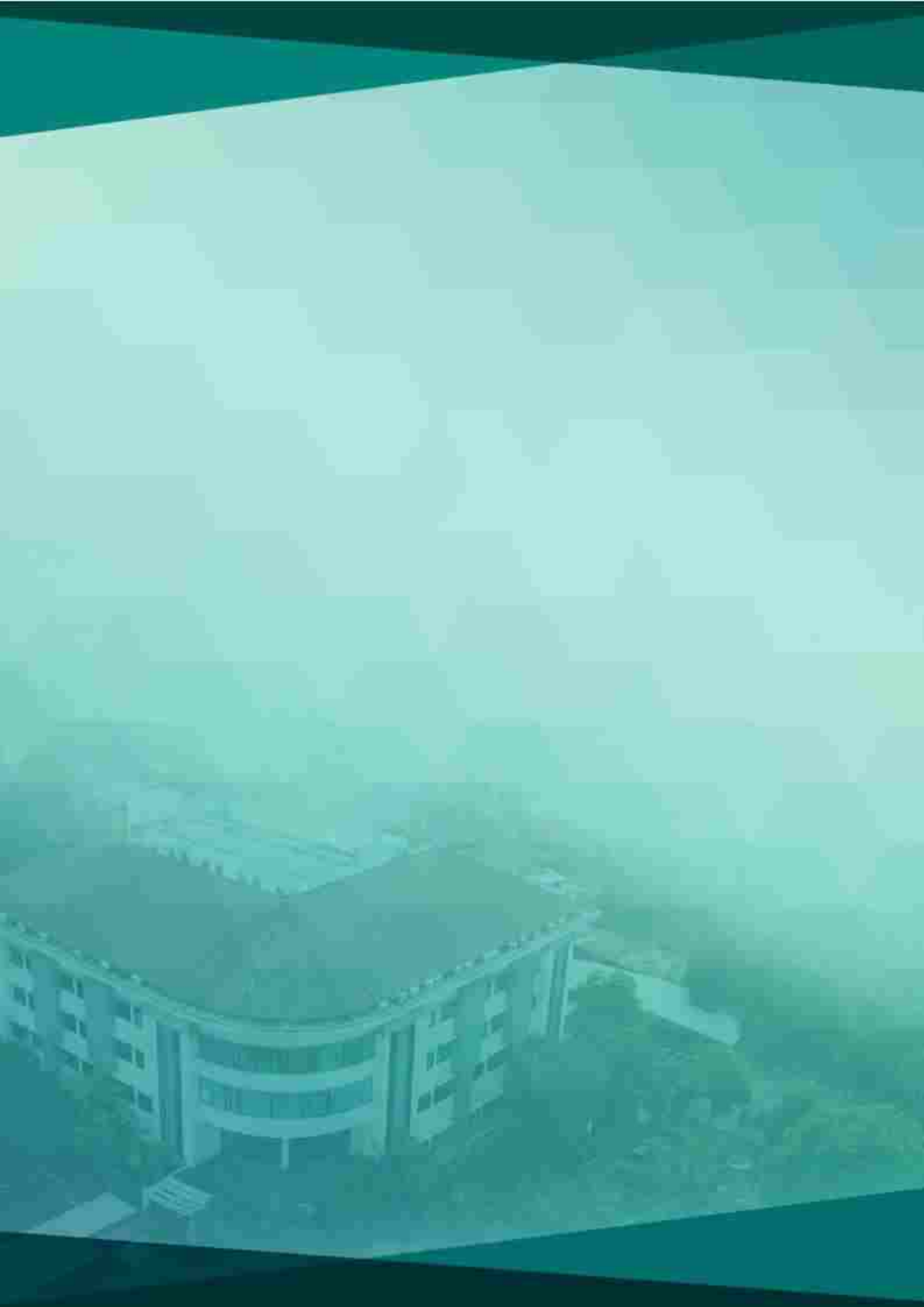
Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1: Meningkatkan Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Yang Adaptif				
SS1: Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku				
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	90	90	100,00
SS2: Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam Kerangka Satu Data Indonesia				
Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral	Persen	85	100	117,65
T2: Meningkatkan kompetensi SDM				
SS3: Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi				
Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	Persen	90	100	111,11
SS4: Terjalinnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan				
Persentase kelulusan peserta tugas belajar	Persen	90	100	111,11
SS5: Penguatan manajemen internal dan sumberdaya				
Hasil penilaian SAKIP	Poin	70	64,72	92,46
Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur	Persen	90	97,46	108,29
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 2021				**106,76**
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 2020				**106,07**